



PROFILE

2024



PEMBANGUNAN GENDER
KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan pertolongan sehingga penyusunan Profil Gender Kabupaten Boyolali Tengah Tahun 2024 ini dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar. Penyusunan profil ini merupakan salah satu langkah kami untuk mendorong pemanfaatan data gender yang telah dikumpulkan dan dikelola dalam penyelenggaraan data gender di Kabupaten Boyolali. Profil ini juga merupakan upaya kami untuk menyediakan informasi yang lebih komprehensif tentang kondisi di Kabupaten Boyolali dalam berbagai Bidang pembangunan.

Hadirnya Profil ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan informasi dan meningkatkan pemahaman pihak terkait yang pada gilirannya akan mendukung partisipasi semua pihak untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak, serta lebih mudahnya pelaksanaan analisis gender untuk mendorong pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Boyolali.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam menyusun profil ini terutama para tenaga ahli, semoga profil ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Akhirnya Kami menyadari Profil Gender Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini masih banyak kekurangannya baik kelengkapan, kedalaman analisis maupun penyajiannya, untuk itu saran perbaikan dimasa datang sangat kami harapkan.

Terima kasih.

Boyolali, Desember 2024

Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Boyolali



Dr. RATRI S. SURVIVALINA, MPA
NIP. 197110092002122006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Tujuan.....	3
D. Sumber Data.....	4
E. Sistematika Penyajian	4
BAB II : KEPENDUDUKAN.....	8
A. Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota.....	8
B. Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	9
C. Penduduk Produktif	10
D. Penduduk Miskin	11
BAB III : INDEKS PEMBANGUNAN GENDER.....	14
A. Indeks Pembangunan Gender	15
B. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).....	15
C. Usia Harapan Hidup (UHH)	15
D. Rata-rata Lama Sekolah (RLS).....	16
BAB IV : INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER	18
A. Indeks Pemberdayaan Gender	18
B. I D G Keterlibatan Perempuan di Parlemen	19
C. I D G Perempuan Sebagai Tenaga Profesional.....	20
D. I D G Sumbangan Pendapatan Perempuan.....	21
BAB V : INDEKS KETIMPANGAN GENDER.....	23
A. Indeks Ketimpangan Gender	23

B. Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF).....	24
C. Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20).....	24
D. Persentase Keterwakilan di Legislatif	25
E. Persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas	26
F. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	27

BAB VI : KESEHATAN..... 30

A. Angka Kematian Ibu (AKI)	30
B. KESEHATAN IBU BERSALIN	33
C. Angka Kematian Bayi (AKB)	34
D. Angka Kematian Balita (AKBa)	37
E. Status Gizi Balita	38
F. HIV (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS).....	39

BAB VII : PENDIDIKAN 43

A. Partisipasi Sekolah	43
B. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	46
C. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	47

BAB VIII : PEMERINTAHAN DAN POLITIK..... 50

A. Data ASN Menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Kabupaten Boyolali Tahun 2023	51
B. Persentase ASN di Lingkungan Kab. Boyolali Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023.....	52
C. Persentase Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Menurut Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2023.....	52
D. Persentase Kepala Desa/ Lurah Menurut Pendidikan Tertinggi.....	53
yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	
E. Persentase Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023.....	54

F. Jumlah Anggota DPRD menurut partai politik di Kabupaten Boyolali Tahun 2023	54
---	----

BAB IX : PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK58

A. Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kab Boyolali.....	58
B. Rasio Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (Per 100.000 Penduduk)	61
C. Penyandang Disabilitas Perempuan dan Anak	63
D. Anak Berhadapan Hukum.....	63
E. Perkawinan Usia dibawah 19 Tahun.....	64
F. Dispensasi Kawin.....	65

BAB X : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA67

A. Pasangan Usia Subur.....	69
B. <i>Contraceptive Prevalence Rate (CPR)</i>	70
C. Unmetneed KB	71

BAB XI : PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

A. Anggaran Responsif Gender.....	72
B. OPD Melaksanakan PPRG.....	72
C. Persentase ARG dibanding APBD.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Boyolali tahun 2023
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Boyolali Tahun 2023
Tabel 2.3	Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali Tahun 2021 - 2023
Tabel 3.1	Data IPG Kabupaten Boyolali Tahun 2021 - 2023
Tabel 3.2	Data HLS Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Boyolali Tahun 2023
Tabel 3.3	Data UHH Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Boyolali Tahun 2023
Tabel 3.4	Data RLS Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Boyolali Tahun 2023
Tabel 4.1	Data IDG Kabupaten Boyolali Tahun 2021 - 2023
Tabel 4.2	Data IDG Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022
Tabel 4.3	Data IDG Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Boyolali Tahun 2021 - 2023
Tabel 4.4	Data IDG Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten Boyolali Tahun 2021 - 2023
Tabel 5.1	Data IKG Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2023
Tabel 5.2	Data MTF Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2023
Tabel 5.3	Data MHPK20 Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2023
Tabel 5.4	Persentase Keterwakilan di Legislatif Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Boyolali Tahun 2023
Tabel 5.5	Persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas Kabupaten Boyolali Tahun 2021 - 2023
Tabel 5.6	Data TPAK Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2023
Tabel 6.1	Data Kematian Ibu Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2023
Tabel 7.1	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah Kabupaten Boyolali Tahun 2023
Tabel 7.2	Persentase Penduduk Usia 5 - 24 Tahun menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah Kabupaten Boyolali Tahun 2023
Tabel 7.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Klasifikasi Desa, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Boyolali Tahun 2023
Tabel 7.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Boyolali Tahun 2022 - 2023
Tabel 7.5	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 – 2023
Tabel 9.1	Rasio Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Boyolali Tahun 2023

Tabel 9.2 Data Anak Berhadapan dengan Hukum Menurut Polres Boyolali tahun 2022

Tabel 9.3 Data Anak Berhadapan dengan Hukum Menurut Polres Boyolali tahun 2023

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif Kabupaten Boyolali tahun 2023

Grafik 2.2 Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Produktif Kabupaten Boyolali tahun 2023

Grafik 5.1 Persentase keterwakilan Legislatif Kabupaten Boyolali pada Level Provinsi Jawa Tengah tahun 2023

Grafik 6.1 Tren Kasus Kematian Ibu Kabupaten Boyolali tahun 2021 - 2023

Grafik 6.2 Angka Kematian Ibu Jawa Tengah Tahun 2023

Grafik 6.3 Cakupan Persalinan di Fasilitas Layanan Kesehatan Kabupaten Boyolali tahun 2019 - 2023

Grafik 6.4 Jumlah Kematian Neonatal, Postnatal, Bayi dan Balita Kabupaten Boyolali tahun 2023

Grafik 6.5 Data Kematian Neonatal per Puskesmas Kabupaten Boyolali tahun 2023

Grafik 6.6 Angka Kematian Bayi Kabupaten Boyolali tahun 2019 – 2023

Grafik 6.7 Kematian Anak Balita per Puskesmas Kabupaten Boyolali tahun 2023

Grafik 6.8 Angka Kematian Balita Kabupaten Boyolali tahun 2019 – 2023

Grafik 6.9 Data Status Gizi Balita Dikabupaten Boyolali Tahun 2023

Grafik 6.10 Grafik Proporsi HIV/AIDS per kelompok umur Kabupaten Boyolali Tahun 2023

Grafik 6.11 Kasus Baru HIV yang ditemukan per Puskesmas Kabupaten Boyolali Tahun 2023

Grafik 8.1 Jumlah ASN Kab Boyolali berdasarkan jenis kelamin tahun 2022-2023

Grafik 8.2 Grafik presentase ASN Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Boyolali Tahun 2023

Grafik 8.3 Data Pejabat di Lingkungan Kabupaten Boyolali menurut Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Grafik 8.4 Persentase Kepala Desa/ Lurah Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkandan Jenis Kelamin Tahun 2023

Grafik 8.5 Persentase Anggota DPRD Kab. Boyolali Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

Grafik 8.6 Jumlah Anggota DPRD menurut partai politik di Kabupaten Boyolali Tahun 2023

Grafik 9.1 Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Boyolali Tahun 2022-2023

Grafik 9.2 Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak menurut Kecamatan dan Jenis Kekerasan Kab Boyolali Tahun 2023

Grafik 9.3 Data perempuan korban kekerasan menurut kecamatan di Kabupaten Boyolali Tahun 2023

Grafik 9.4 Data Anak korban kekerasan menurut kecamatan di Kabupaten Boyolali Tahun 2023

Grafik 9.5 Data Anak korban kekerasan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Boyolali Tahun 2023

Grafik 9.6 Data penyandang disabilitas Anak Kabupaten Boyolali berdasarkan jenis kelamin Tahun 2023

Grafik 9.7 Data konseling pranikah dibawah umur Kabupaten Boyolali Tahun 2023

Grafik 10.1 Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Boyolali Tahun 2023

Grafik 10.2 *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* Kabupaten Boyolali tahun 2023

Grafik 10.3 Data angka unmetneed menurut kecamatan kabupaten Boyolali Tahun 2023

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 11.1 Daftar Inovasi OPD Tahun 2023

BAB I



PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Namun jika diperhatikan untuk mewujudkan pembangunan masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan gender tersebut.

Kesetaraan Gender (gender equity) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Sementara itu, keadilan gender (gender equality) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional menyatakan bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Penduduk Kabupaten Boyolali berjumlah 1.079.952 jiwa. yang terdiri dari 543.113 jiwa laki-laki dan 536.839 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin 101,1. Penduduk Kabupaten Boyolali termasuk dalam piramida penduduk tipe ekspansif. Tipe ini menunjukkan penduduk di wilayah tersebut berada dalam keadaan tumbuh dengan jumlah penduduk usia muda lebih besar, angka kelahiran tinggi, dan tingkat kematian bayi rendah, sedangkan kelompok penduduk lanjut usia (di atas 65 tahun) 8,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk sepertiga penduduk Kabupaten Boyolali. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka Pemerintah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka disusun buku **“Profil Gender Kabupaten Boyolali Tahun 2024”**.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Profil Gender Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 6 Sub Urusan, yaitu: Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
4. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Buku Profil Gender Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah untuk menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan kondisi perempuan dibanding dengan laki-laki terkait dengan masalah kependudukan, karakteristik rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, pemerintahan, politik, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya, dan kesulitan fungsional penyandang disabilitas.

D. Sumber Data

Data yang disajikan dalam Profil Gender Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

1. Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali Tahun 2024
2. Publikasi Organisasi Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2024
3. Publikasi Dinas DP2KBP3A Kabupaten Boyolali Tahun 2024
4. Publikasi Perkawinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Boyolali Tahun 2024
5. SIMFONI-PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
6. E-Kekerasan Jateng

E. Sistematis Penyajian

Sistematika Penyajian Buku Profil Gender Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan
- D. Sumber Data
- E. Sistematika Penyajian

BAB II : KEPENDUDUKAN

- A. Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota
- B. Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin
- C. Penduduk Produktif
- D. Penduduk Miskin

BAB III : INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

- A. Indeks Pembangunan Gender
- B. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
- C. Usia Harapan Hidup (UHH)
- D. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

- E. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP)

BAB IV : INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

- A. Indeks Pemberdayaan Gender
- B. Keterlibatan Perempuan di Parlemen
- C. Perempuan Sebagai Tenaga Profesional
- D. Sumbangan Pendapatan Perempuan

BAB V : INDEKS KETIMPANGAN GENDER

- A. Indeks Ketimpangan Gender
- B. Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF)
- C. Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20)
- D. Persentase Keterwakilan di Legislatif
- E. Persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas

BAB VI : KESEHATAN

- A. Angka Kematian Ibu (AKI)
- B. Angka Kematian Bayi (AKB)
- C. Angka Kematian Balita (AKBa)

BAB VII : PENDIDIKAN

- A. Partisipasi Sekolah
- B. Angka Partisipasi Sekolah
- C. Angka Partisipasi Kasar
- D. Angka Partisipasi Murni

BAB VIII : PEMERINTAHAN DAN POLITIK

- A. Persentase PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2023
- B. Persentase Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2023
- C. Persentase Kepala Desa/ Lurah Menurut Pendidikan Tertinggi yang

Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

D. Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

E. Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2022

BAB IX : PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

A. Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

B. Rasio Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (Per 100.000 Penduduk)

C. Kekerasan Perempuan dan Anak berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami

D. Penyandang Disabilitas Perempuan dan Anak

E. Anak Berhadapan Hukum

F. Perkawinan Usia dibawah 19 Tahun

G. Dispensasi Kawin

BAB X : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

A. Pasangan Usia Subur

B. *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)*

C. Unmetneed KB

BAB II



KEPENDUDUKAN

BAB II

KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus juga sebagai komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

Maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh penduduk yang potensial dan mempunyai SDM yang trampil dan handal. Penduduk merupakan objek atau sasaran Pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus

A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Proyeksi penduduk Kabupaten Boyolali Tahun 2023 menunjukkan jumlah 1.079.952 jiwa. yang terdiri dari 543.113 jiwa laki-laki dan 536.839 jiwa perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan Perempuan disajikan melalui angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*). *Sex ratio* penduduk Kabupaten Boyolali sebesar 101,1. Artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101,1 penduduk laki-laki. ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan.

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Boyolali
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin			Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Kabupaten Boyolali	543.113	536.839	1.079.952	101,2
	Kabupaten Boyolali	543.113	536.839	1.079.952	101,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Boyolali 2023

Berdasarkan tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa *Sex ratio* penduduk Kabupaten Boyolali sebesar 101,1. Artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101,1 penduduk laki-laki. ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan. Dengan berimbangnya jumlah penduduk Perempuan dengan laki-laki di Kabupaten Boyolali, maka kebijakan dan program-program pembangunan harus mempertimbangkan aspek-aspek sesuai kebutuhangender.

B. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk muda yang ditandai dengan bagian bawah piramida yang relatif lebar. Frekuensi terbesar untuk penduduk laki-laki maupun perempuan berada pada kelompok umur 0 – 4 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran pada periode 5 tahun terakhir cukup tinggi.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Kabupaten Boyolali Tahun 2023

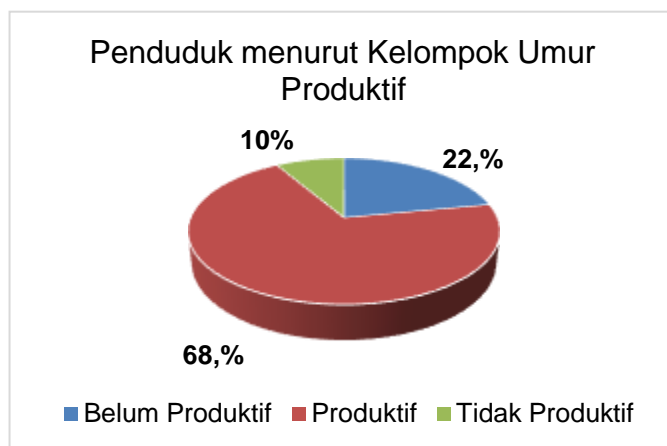
Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	40 372	38 663	79 035
5–9	39 528	37 917	77 445
10–14	41 231	39 121	80 352
15–19	41 223	38 853	80 076
20–24	41 281	38 629	79 910
25–29	40 471	38 953	79 424
30–34	40 170	39 776	79 946
35–39	41 396	38 991	80 387
40–44	39 039	38 157	77 196
45–49	37 404	36 423	73 827
50–54	34 331	35 390	69 721
55–59	30 637	31 808	62 445
60–64	26 231	27 125	53 356
65–69	20 382	21 387	41 769
70–74	14 186	16 409	30 595
75+	15 231	19 237	34 468
Kabupaten Boyolali	543 113	536 839	1 079 952

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali 2023

Piramida penduduk Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada Grafik 2.2 yang menunjukkan bahwa 316.908 jiwa (29,34 persen) penduduk Kabupaten Boyolali adalah anak-anak usia 0-19 tahun. Sedangkan penduduk lanjut usia (di atas 60 tahun) sebanyak 160.188 jiwa (14,83 persen). Dari data tersebut, maka kebijakan dan program pembangunan berkaitan gender dapat disesuaikan sesuai kelompok umur.

C. Penduduk Produktif

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu belum produktif (0-14 tahun), produktif (15-65 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).



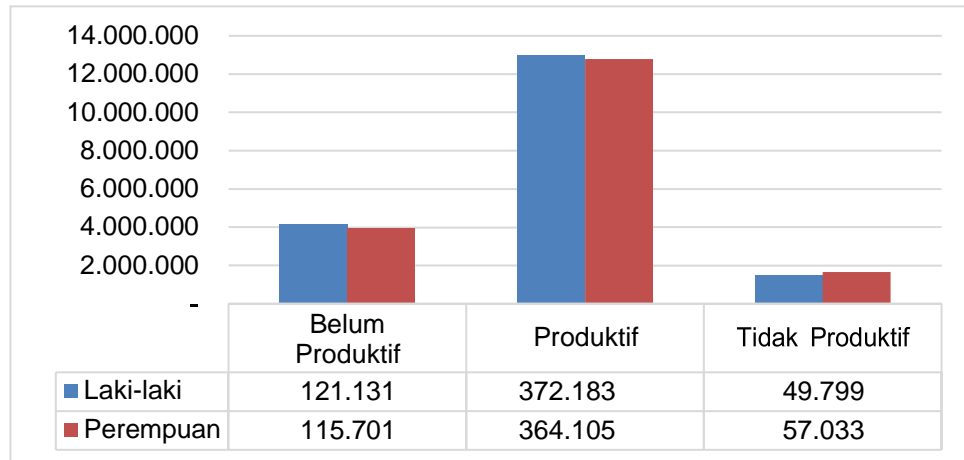
Grafik 2.1

Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif Boyolali Tahun 2023

Grafik 2.1 menunjukkan bahwa sebanyak 236.832 jiwa (21,9 persen) penduduk Kabupaten Boyolali berusia 0-14 tahun, 736.288 jiwa (68,17 persen) penduduk berusia 15-64 tahun, dan 106.832 jiwa (9,93 persen) penduduk berusia 65 tahun ke atas.

Grafik 2.2

Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Produktif Kabupaten Boyolali Tahun 2023



Grafik 2.2 menunjukkan bahwa komposisi penduduk produktif berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan pada kelompok umur belum produktif dan produktif. Sedangkan pada kelompok umur tidak produktif jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

D. Penduduk Miskin

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi Dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Tabel 2.3
Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali Tahun
2021 - 2023

No	Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin(persen)		
		2021	2022	2023
1	Kabupaten Boyolali	10,62	9,82	9,81
36	PROVINSI JAWA TENGAH	11,25	10,93	10,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali 2023

Berdasarkan tabel 2.3 di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Boyolali secara bertahap menurun dari Tahun 2021 10,62%, Tahun 2022 menjadi 9,82 dan tahun 2023 turun menjadi 9,81% dan sudah dibawah persentase angka kemiskinan tingkat provinsi Jawa Tengah.

BAB III



INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

BAB III

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

A. Indeks Pembangunan Gender

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Komposit Indeks Pembangunan Gender, yaitu:

1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
2. Usia Harapan Hidup (UHH)
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
4. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP)

Tabel 3.1

Data IPG Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
9	Kabupaten Boyolali	94,22	94,37	94,70
36	PROVINSI JAWA TENGAH	92,48	92,83	92,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2023

Berdasarkan Grafik 3.1 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Boyolali Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami peningkatan dari tahun 2021 s/d Tahun 2023. Namun Peningkatan tersebut masih dibawah angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah.

B. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.

Tabel 3.2

Data HLS Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Boyolali Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	HLS	
		Laki-laki	Perempuan
1	Kabupaten Boyolali	12,38	13,41
	PROVINSI JAWA TENGAH	12,76	13,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2023

Berdasarkan tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Boyolali angka harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi 1,03 dibanding angka harapan lama sekolah pada laki- laki, sedang dibandingkan HLS Provinsi Jawa Tengah HLS Laki – laki Kabupaten Boyolali lebih rendah sedangkan HLS perempuan lebih tinggi

C. Usia Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Tabel 3.3

Data UHH Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Boyolali Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	UHH	
		Laki-laki	Perempuan
1	Kabupaten Boyolali	74,39	78,14
	PROVINSI JAWA TENGAH	72,95	76,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2023

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Usia Harapan Hidup (UHH) Laki-laki sebesar 74,39 lebih rendah dibandingkan UHH perempuan Kabupaten Boyolali sebesar 78,14 dengan selisih 3.75. di KanAngka UHH Kabupaten Boyolali lebih tinggi dibandingkan (UHH) Provinsi Jawa Tengah.

D. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Indikator ini untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS/Mean Years of Schooling) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Tabel 3.4

Data RLS Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Boyolali Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	RLS	
		Laki-laki	Perempuan
1	Kabupaten Boyolali	8,74	7,52
36	PROVINSI JAWA TENGAH	8,42	7,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2023

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Boyolali lebih tinggi laki - laki dibandingkan dengan perempuan, Sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah angka RLS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki – laki dengan selisih 1.22.

E. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP)

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

Tabel 3.5

PPP Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PPP (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	
		Laki-laki	Perempuan
1	Kabupaten Boyolali	18.396	13.172
36	PROVINSI JAWA TENGAH	16.102	10.513

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2023

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) di Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi laki-laki dibandingkan dengan perempuan, PPP laki-laki sebesar **16.102** sedangkan perempuan sebesar **10.513**. Sedangkan, pada Kabupaten Boyolali angka PPP laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan selisih 5.224.

BAB IV



INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

BAB IV

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

A. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Indeks Pemberdayaan Gender digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan dan meningkatkan peran dan kemandirian suatu lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Adapun Analisis Indikator Pembentuk (Indeks Pemberdayaan Perempuan) IDG adalah sebagai berikut:

1. Persentase Keterlibatan di Parlemen
2. Persentase Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
3. Sumbangan dalam Pendapatan Kerja

Tabel 4.1

Data IPG Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kabupaten Boyolali	82,23	82,94	82,98
2	PROVINSI JAWA TENGAH	71,73	71,64	73,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali 2023

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Boyolali Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami kenaikan dari tahun 2021 yaitu 82,23, tahun 2022 naik menjadi 82,94 tahun 2023 naik menjadi 82,98 secara signifikan lebih tinggi dibanding Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah sampai tahun 2023 mencapai angka **73,78**.

B. IDG Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Tabel 4.2

Data IDG Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten /Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kabupaten Cilacap	26,00	26,00	26,00
2	Kabupaten Banyumas	22,00	20,00	22,00
3	Kabupaten Purbalingga	22,22	22,22	22,22
4	Kabupaten Banjarnegara	26,00	26,00	26,00
5	Kabupaten Kebumen	22,00	22,00	22,00
6	Kabupaten Purworejo	17,78	17,78	17,78
7	Kabupaten Wonosobo	4,44	4,44	4,44
8	Kabupaten Magelang	14,00	14,00	14,00
9	Kabupaten Boyolali	31,11	31,11	31,11
10	Kabupaten Klaten	16,00	18,00	14,00
11	Kabupaten Sukoharjo	22,22	22,22	22,73
12	Kabupaten Wonogiri	16,33	16,00	16,00
13	Kabupaten Karanganyar	20,00	18,18	18,18
14	Kabupaten Sragen	11,36	13,33	15,56
15	Kabupaten Grobogan	12,00	12,00	12,00
16	Kabupaten Blora	11,11	11,11	8,89
17	Kabupaten Rembang	13,64	13,33	13,33
18	Kabupaten Pati	16,00	16,00	16,00
19	Kabupaten Kudus	8,89	8,89	8,89
20	Kabupaten Jepara	12,00	12,00	12,00
21	Kabupaten Demak	12,00	12,00	12,00
22	Kabupaten Semarang	18,37	22,00	18,00
23	Kabupaten Temanggung	33,33	33,33	33,33
24	Kabupaten Kendal	24,44	24,44	24,44
25	Kabupaten Batang	15,56	15,91	15,56
26	Kabupaten Pekalongan	27,91	26,67	26,67
27	Kabupaten Pemalang	32,00	32,00	32,00
28	Kabupaten Tegal	24,00	24,00	24,00

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
29	Kabupaten Brebes	16,00	16,00	16,00
30	Kota Magelang	20,00	24,00	24,00
31	Kota Surakarta	22,22	22,22	24,44
32	Kota Salatiga	20,00	24,00	24,00
33	Kota Semarang	20,41	18,75	18,00
34	Kota Pekalongan	8,82	8,57	11,43
35	Kota Tegal	13,33	13,33	13,33
36	PROVINSI JAWA TENGAH	18,80	18,33	20,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali 2023

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota dengan IDG komposit Keterlibatan Perempuan di Parlemen tertinggi adalah Kabupaten Temanggung sebesar 33,33. Posisi kedua Kabupaten Pemalang sebesar 32,00 dan posisi ketiga Kabupaten Boyolali sebesar 31,11. Sedangkan IDG komposit Keterlibatan Perempuan di Parlemen paling rendah adalah Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 4,44.

C. IDG Perempuan Sebagai Tenaga Profesional

Tabel 4.3

Data IDG Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Boyolali Tahun
2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kabupaten Boyolali	48,58	54,53	49,22
	PROVINSI JAWA TENGAH	50,67	50,72	51,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali 2023

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Boyolali IDG komposit Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dari tahun 2021 dari angka 48,58 menjadi naik 54,53 di tahun 2022 namun mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 49,22. Dibandingkan IDG komposit Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan tahun 2023 Boyolali lebih rendah nilainya, nilai lebih tinggi dari Provinsi Jawa tengah di tahun 2023 yaitu 51,00.

D. IDG Sumbangan Pendapatan Perempuan

Tabel 4.4

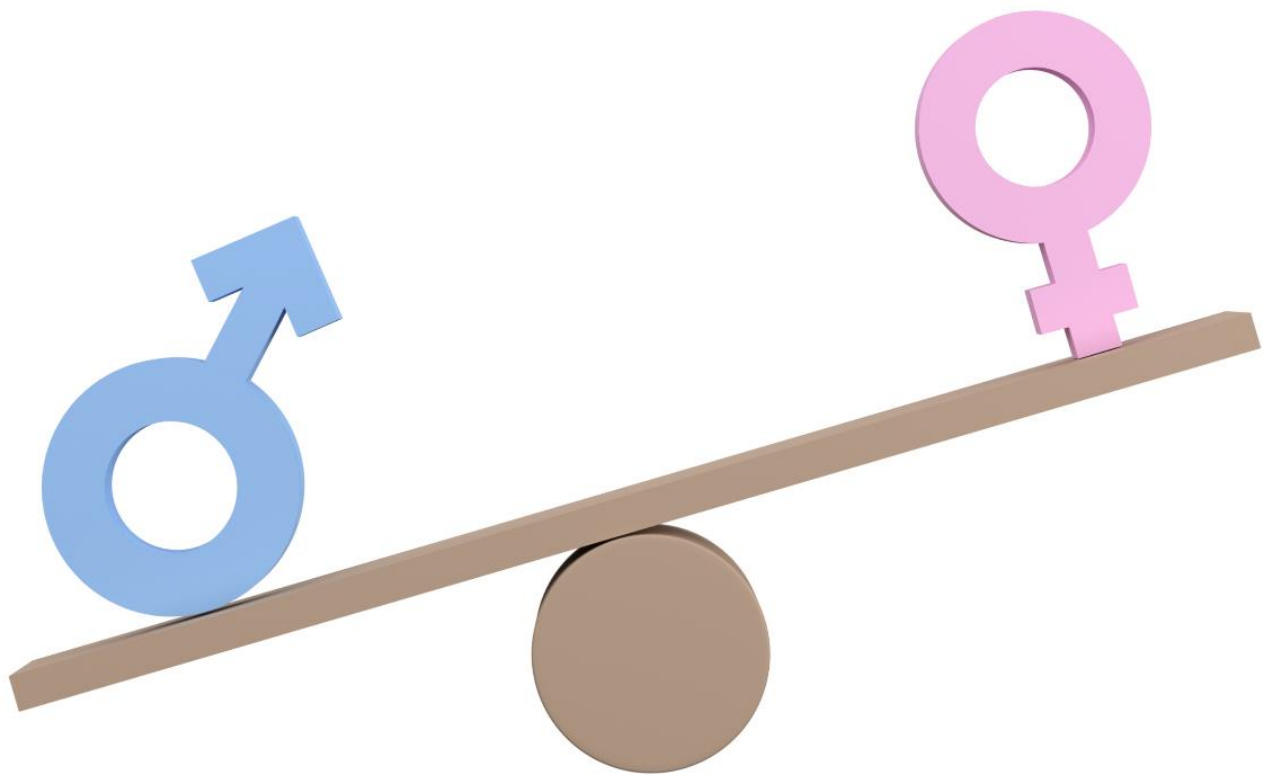
Data IDG Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten
Boyolali Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kabupaten Boyolali	40,97	41,70	41,66
	PROVINSI JAWA TENGAH	34,60	34,59	35,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Boyolali IDG komposit Sumbangan Pendapatan Perempuan mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan 40,97 menjadi 41,70 dan mengalami penurunan menjadi 41,66 di tahun 2023. Sedangkan dibandingkan angka Provinsi Jawa Tengah, secara berturut turut IDG komposit Sumbangan Pendapatan Perempuan di atas angka Provinsi Jawa Tengah.

BAB V



INDEKS KETIMPANGAN GENDER

BAB V

INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)

A. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Penghitungan Indes Ketimpangan Gender (IKG) mengadopsi penghitungan Gender Inequality Index (GII) dari United Nations Development Programme (UNDP) dengan beberapa penyesuaian. Indikator Maternal Mortality Rate (MMR) atau Angka Kematian Ibu (AKI) yang tidak tersedia secara kontinu setiap tahun didekati dengan indikator proporsi perempuan 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF). Penggunaan indikator MTF sebagai proksi didasari oleh pertimbangan bahwa indikator tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan indikator AKI dan tersedia di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota secara rutin setiap tahun. Di samping itu, persalinan di fasilitas kesehatan dapat menekan risiko kematian ibu dalam melahirkan sehingga diharapkan dapat menggambarkan pencapaian AKI.

Untuk indikator Adolescent Birth Rate (ABR) yang digunakan oleh UNDP dalam penghitungan GII didekati dengan indikator proporsi perempuan berusia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Penggunaan indikator MHPK20 sebagai proksi didasari oleh pertimbangan bahwa indikator tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan indikator ABR dan tersedia di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota secara rutin setiap tahun.

Sementara itu, 3 (tiga) indikator lainnya sama dengan yang digunakan oleh UNDP dalam menyusun GII, yaitu persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas, persentase anggota legislatif, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator MTF dan MHPK20, dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas dan persentase anggota legislatif, dan dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator TPAK.

Tabel 5.1
Data IKG Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kabupaten Boyolali	0,279	0,363	0,306
2	PROVINSI JAWA TENGAH	0,377	0,371	0,336

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2023

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Boyolali dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2021 adalah 0,279 kemudian naik menjadi 0,363 di tahun 2022 dan menurun menjadi 0,306 di tahun 2023. Angka tersebut masih lebih rendah dibanding angka ketimpangan gender Provinsi Jawa Tengah.

B. Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF)

Tabel 5.2
Data MTF Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kabupaten Boyolali	0,021	0,065	0,029
	PROVINSI JAWA TENGAH	0,042	0,042	0,027

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2023

Berdasarkan tabel 5.2 di atas Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) tahun 2021 adalah 0,021 lebih rendah dari tahun 2022 yaitu 0,065 dan lebih tinggi dari tahun 2023 yaitu 0,29 hampir semua sudah di fasilitas kesehatan.

C. Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20)

Tabel 5.3

MHPK20 Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kabupaten Boyolali	0,237	0,233	0,235
2	PROVINSI JAWA TENGAH	0,267	0,264	0,260

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2023

Berdasarkan tabel 5.3 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota dengan Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20) paling rendah adalah tahun 2022 sebesar 0,233, sedangkan tertinggi tahun 2021 yaitu 0,237 apabila dibanding dengan angka provinsi Jawa Tengah maka posisi Boyolali sudah lebih rendah selama 3 tahun berturut –turut.

D. Persentase Keterwakilan di Legislatif

Tabel 5.4

Persentase Keterwakilan di Legislatif Menurut Jenis Kelamin

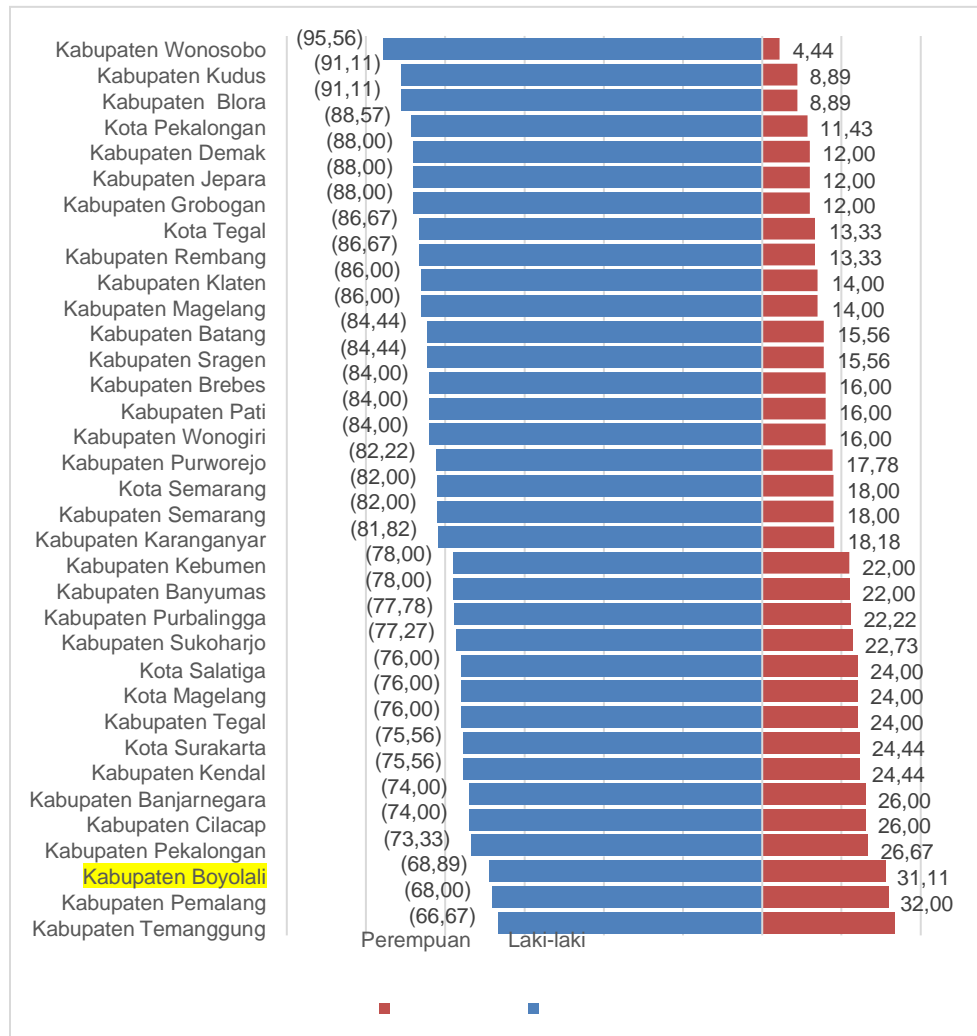
Kabupaten Boyolali Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Kabupaten Boyolali	68,89	31,11
2	PROVINSI JAWA TENGAH	80,00	20,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2023

Grafik 5.1

Persentase Keterwakilan di Legislatif Kabupaten Kabupaten
Boyolali di level Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Berdasarkan Grafik 5.1 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota dengan Persentase Keterwakilan di Legislatif Perempuan paling tinggi adalah Kabupaten Temanggung sebesar 33,33. Posisi kedua Kabupaten Pemalang sebesar 32,00 dan posisi ketiga Kabupaten Boyolali sebesar 31,11. Sedangkan Persentase Keterwakilan di Legislatif Perempuan paling rendah adalah Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 4,44.

E. Persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA keatas

Tabel 5.5

Persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Persentase penduduk usia 25 Tahun keatas dengan pendidikan SMA ke atas menurut jenis kelamin (Persen)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kabupaten Boyolali	35,97	36,92	38,26	27,02	28,44	28,50
Provinsi Jawa Tengah	32,26	34,14	34,82	26,82	28,79	29,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 202

F. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tabel 5.6

Data TPAK Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	TPAK Menurut Jenis Kelamin					
	Laki-laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kabupaten Boyolali	86,13	85,12	85,48	65,93	66,34	63,99
Provinsi Jawa Tengah	81,94	83,74	84,52	57,58	58,31	58,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2023

Berdasarkan tabel 5.6 di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki tertinggi diraih pada Tahun 2023 dengan angka 85,48 serta lebih tinggi Kabupaten Boyolali apabila dibanding TPAK Laki – laki tingkat Jawa Tengah yaitu 84,52.

Sedangkan TPAK perempuan tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan dari angka 66,34 menjadi 63,99, dengan kondisi lebih tinggi dari TPAK perempuan tingkat provinsi Jawa Tengah.

BAB VI



KESEHATAN

BAB VI

KESEHATAN

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Hak atas kesehatan merupakan hak yang melekat pada setiap individu. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi.

Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang mendukung setiap individu untuk hidup sehat. Salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Upaya negara dalam melindungi hak kesehatan bagi penduduk tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber daya kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

A. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu adalah kematian wanita saat hamil atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, terlepas dari usia kehamilan dan lokasi kehamilan, dari sebab apa pun yang terkait dengan atau diperburuk oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan karena kecelakaan atau kejadian insidental.

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Boyolali tahun 2023 sebesar 8 orang sehingga angka kematian ibu adalah sebesar 63,7 per 100.000

kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu tahun 2023 jika dibandingkan dengan kasus kematian ibu di tahun 2022 maka sudah mengalami penurunan, karena pada tahun 2022 jumlah kasus kematian ibu sebanyak 20 kasus.

Tabel 6.1

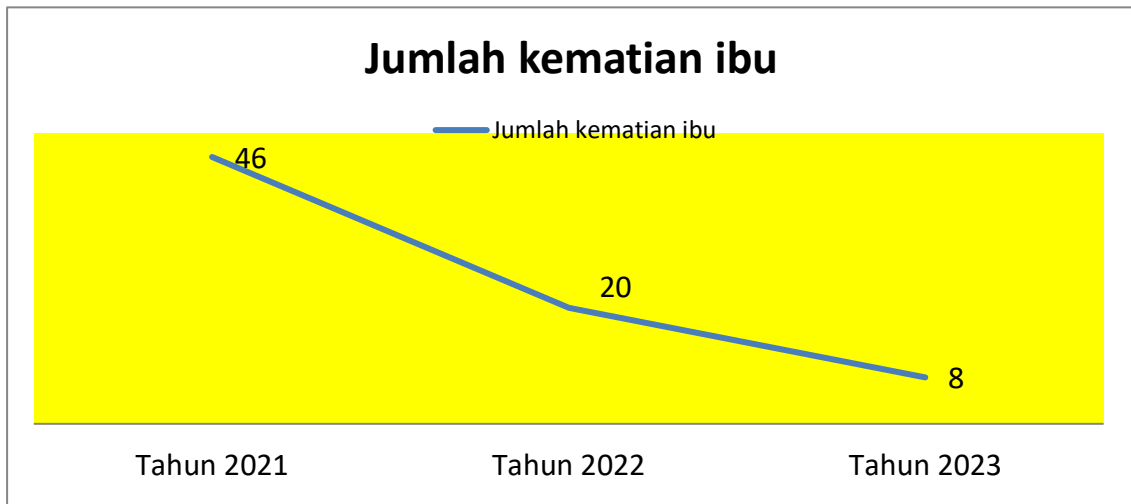
Data kematian ibu Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2023

No	Puskesmas	Data kematian ibu					
		2021		2022		2023	
		Absolut	Angka	Absolut	Angka	Absolut	Angka
1	SELO	1	263,9	0	0	0	0
2	AMPEL	0	-	0	0	1	88,3
3	GLADAGSARI	1	165,6	0	0	2	90
4	CEPOGO	4	478,5	0	0	0	0
5	MUSUK	0	-	1	299	0	0
6	TAMANSARI	0	-	1	300	0	0
7	BOYOLALI 1	0	-	2	450	0	0
8	BOYOLALI 2	2	381,7	0	0	0	0
9	MOJOSONGO	2	257,7	1	129	1	82,6
10	TERAS	3	547,4	0	0	0	0
11	SAWIT	0	-	2	548	0	0
12	BANYUDONO 1	2	568,2	1	284	0	0
13	BANYUDONO 2	1	355,9	0	0	0	0
14	SAMBI	5	847,9	0	0	0	0
15	NGEMPLAK	5	448,4	5	448	0	0
16	NOGOSARI	6	588,2	2	196	0	0
17	SIMO	2	333,9	1	167	2	95
18	KARANGGEDE	5	809,1	0	0	0	0
19	KLEGO 1	0	-	0	0	0	0
20	KLEGO 2	0	-	1	287	0	0
21	ANDONG	0	225,2	1	124	0	0
22	KEMUSU	1	225,2	0	0	0	0
23	WONOSEGORO	3	642,4	2	434	0	0
24	WONOSAMODRO	2	443,5	0	0	1	69,8
25	JUWANGI	1	235,3	0	0	0	0
Kabupaten		46	333,4	20	148,9	8	63,70

Sumber: Profil kesehatan kabupaten Boyolali tahun 2023

Grafik 6.1

Tren Kasus Kematian Ibu Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2023

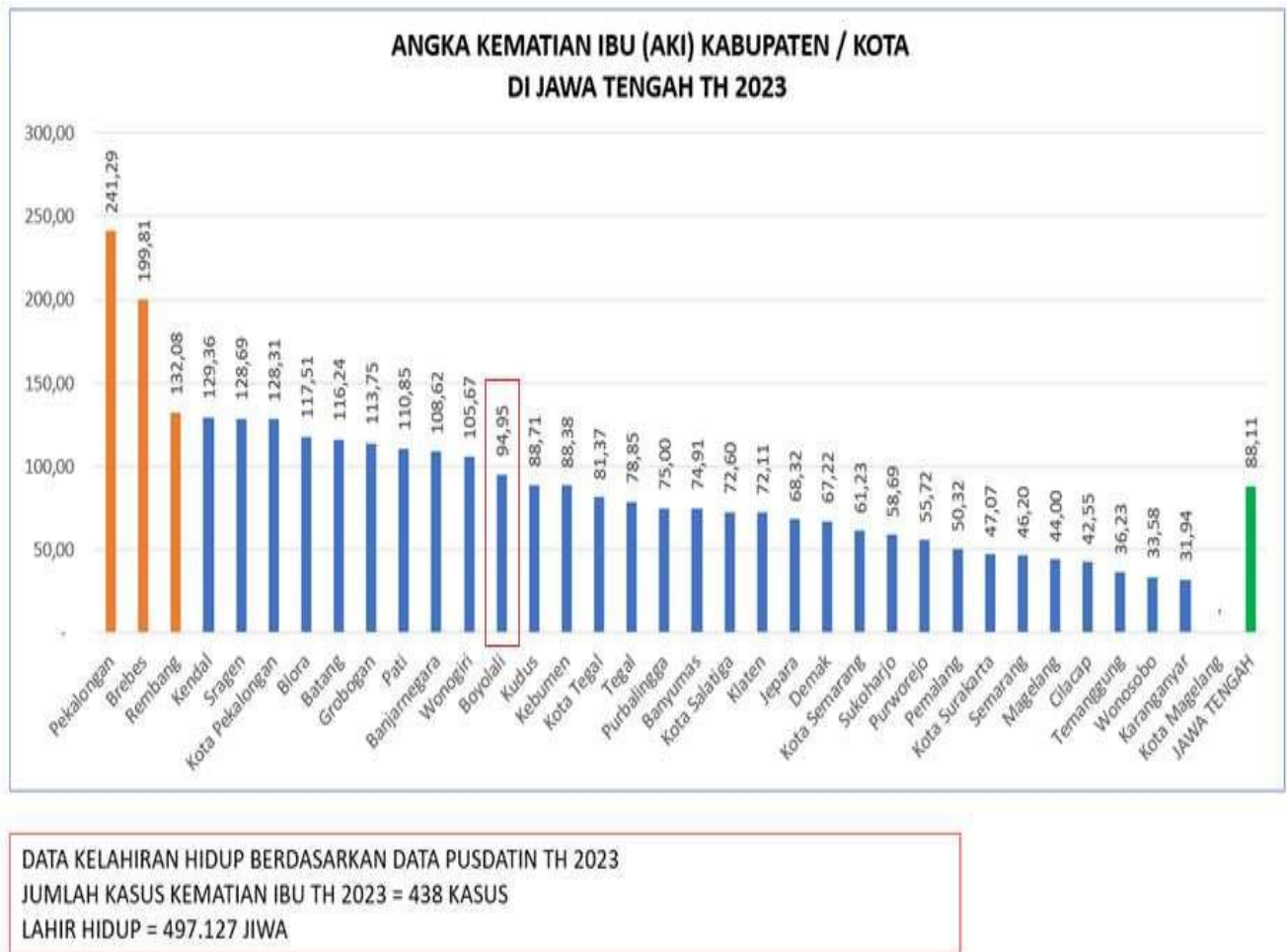


Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali

Penyebab kematian ibu di Kabupaten Boyolali tahun 2023 diantaranya adalah 3 kasus pendarahan, 2 kasus infeksi, 1 kasus gangguan autoimun, 2 kasus dengan penyebab lainnya.

Besaran AKI ini ada dua data dimana salah satunya berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Pusdatin Kemenkes). Nilai AKI berdasarkan data Kementerian Kesehatan ini sebesar 94,95 berbeda dengan jumlah perhitungan AKI kabupaten Boyolali. Hal ini diakibatkan oleh denominator jumlah lahir hidup yang berbeda.

Grafik 6.2
 Grafik AKI Jawa Tengah Tahun 2023 Berdasarkan Data Kementerian
 Kesehatan (Pusdatin Kemenkes)

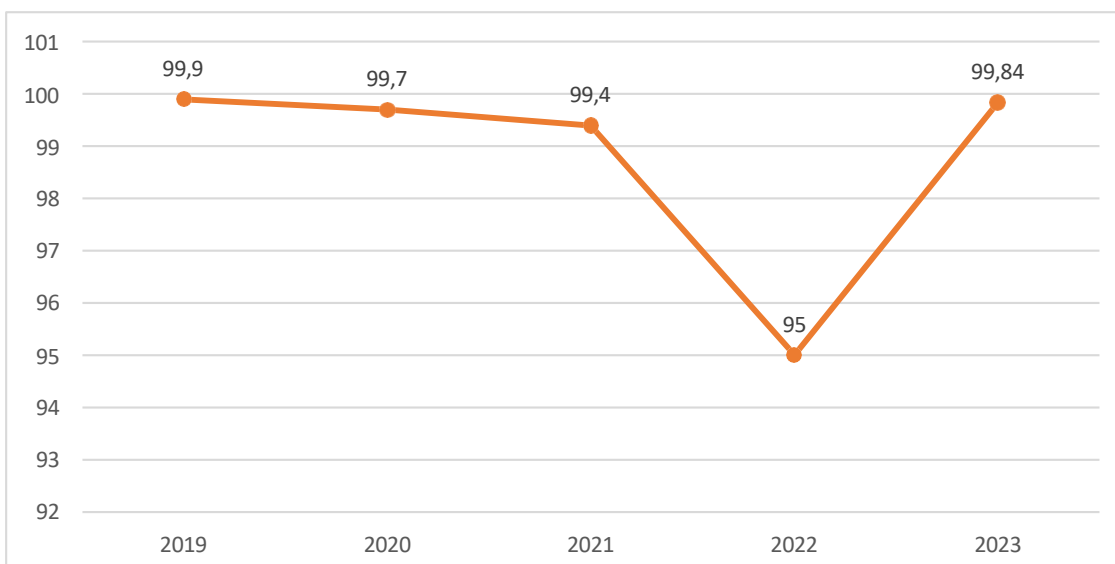


B. KESEHATAN IBU BERSALIN

Indikator keberhasilan pelayanan kesehatan ibu bersalin diukur dengan persentase persalinan difasilitas kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih difasilitas pelayanan kesehatan.

Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan tahun 2023 dikabupaten Boyolali sebesar 99,84 %. Dari 12.433 persalinan 12.413 ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, sedangkan terdapat 20 persalinan tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (di perjalanan rujukan 6, di rumah ibu 11, dan 4 di Polindes).

GRAFIK 6.3.
Grafik Cakupan Persalinan Di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019-
2023



Sumber: Profil kesehatan kabupaten Boyolali tahun 2023

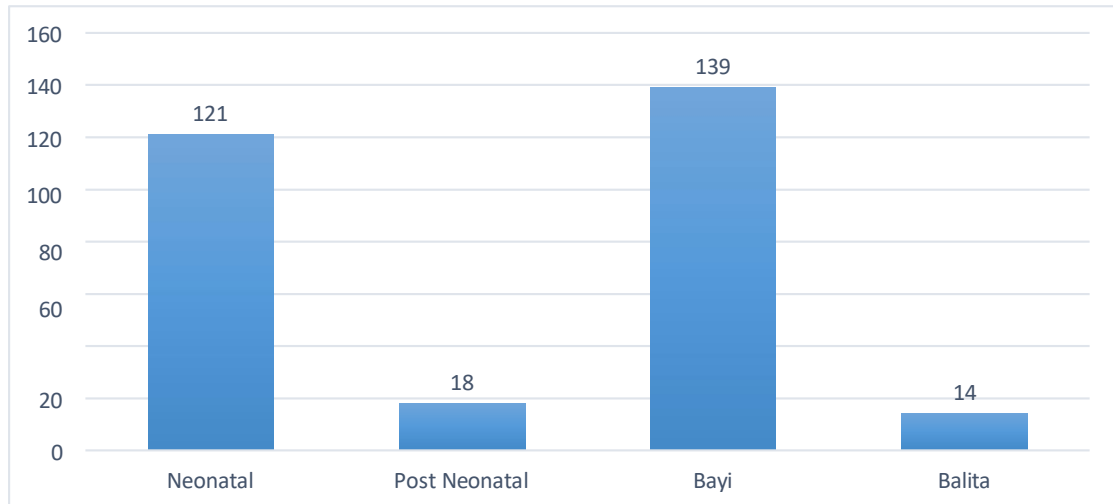
C. Angka Kematian Bayi (AKB)

Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun. Upaya kesehatan anak bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya penurunan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBAL).

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0- 11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan Angka Kematian Balita (AKBAL) merupakan jumlah balita usia 0 sampai 59 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah pada kurun waktu yang sama dikalikan 1.000/Kelahiran Hidup. Secara keseluruhan kasus kematian yang terjadi pada balita 0-59 bulan di kabupaten Boyolali tahun 2023 dapat dilihat pa grafik 6.4:

Grafik 6.4

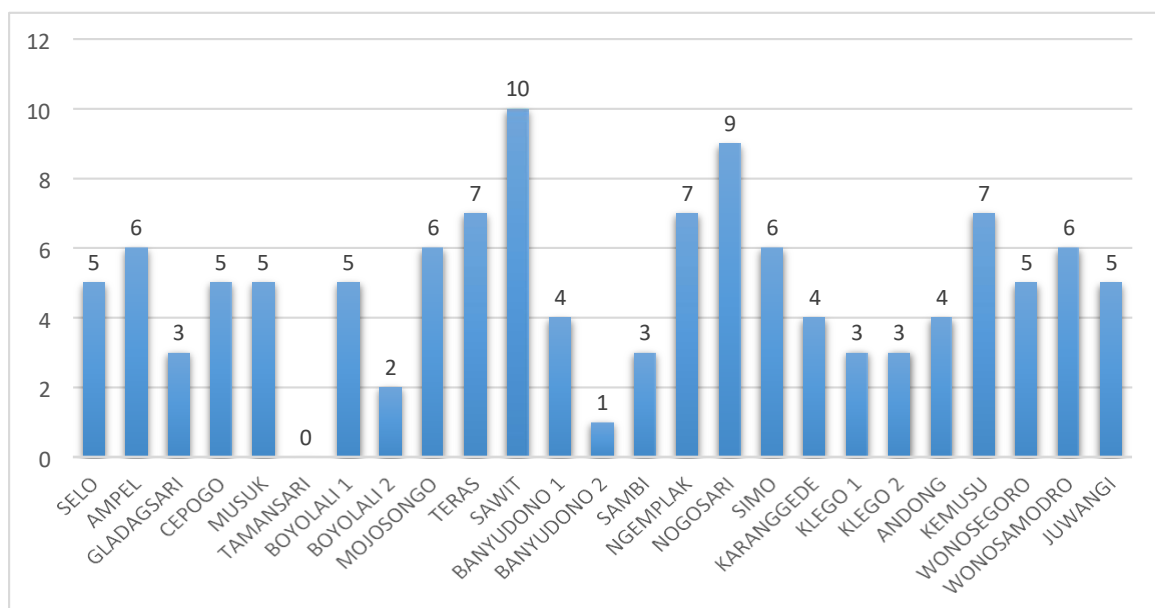
Grafik Jumlah Kematian Neonatal, Post Neonatal, Bayi dan Balita di Kabupaten Boyolali Tahun 2023



Kematian Neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Kematian Neonatal di Kabupaten Boyolali tahun 2023 sejumlah 121. Penyebab Kematian Neonatal terbanyak adalah BBLR dan Prematuritas 60 kasus, asfiksia 18 kasus, infeksi 14 kasus, kelainan kongenital 26 kasus dan lain – lain 3 kasus.

Grafik 6.5

Kematian Neonatal Per Puskesmas Di Kabupaten Boyolali Tahun 2023

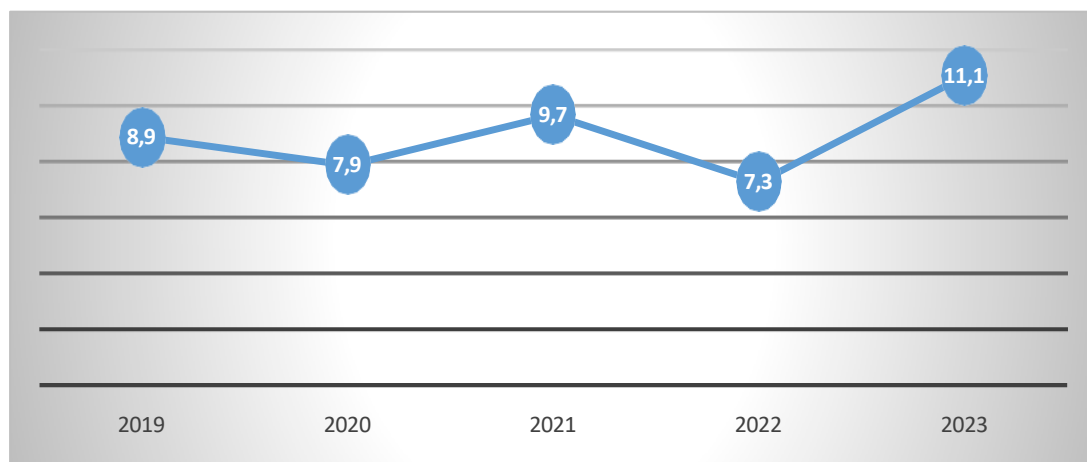


Sumber: Profil kesehatan kabupaten Boyolali tahun 2023

Penyebab tertinggi kasus kematian Neonatal adalah BBLR dan prematuritas, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sendiri adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram. Pada Tahun 2023 dari keseluruhan bayi baru lahir hidup yaitu sebesar 12.566 bayi, sebanyak 12.349 bayi ditimbang, hasilnya terdapat 533 bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) atau sebanyak 4,5%. Sedangkan untuk bayi Prematur atau bayi yang lahir sebelum usia kandungan mencapai 37 minggu sebanyak 311 bayi.

Grafik 6.6
Grafik Angka Kematian Bayi di Kabupaten Boyolali
Tahun 2019-2023

Sumber: Profil kesehatan kabupaten Boyolali tahun 2023



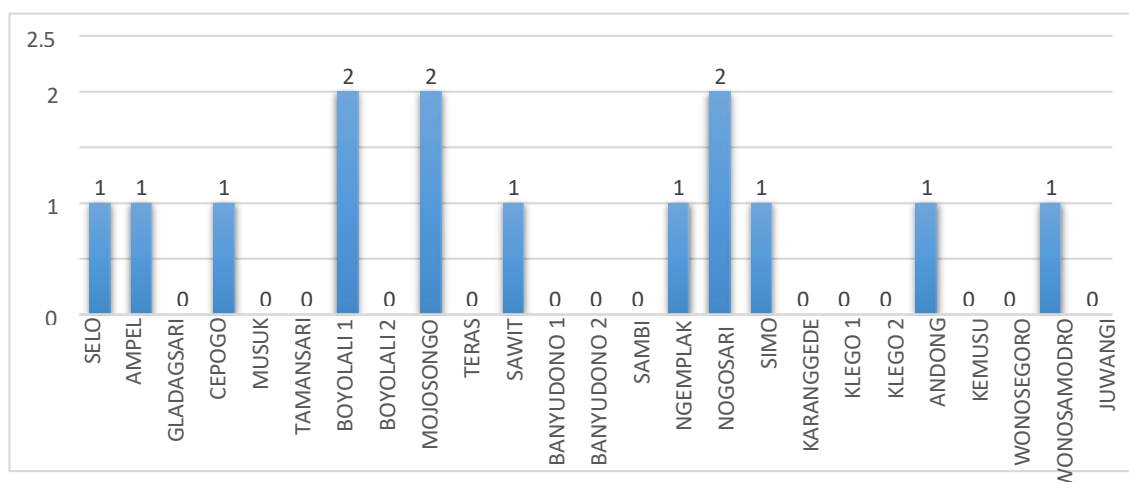
Sumber: Profil kesehatan kabupaten Boyolali tahun 2023

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0- 11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Dari data jumlah kematian bayi diatas dapat dicari nilai AKB nya. Pada tahun ini terjadi peningkatan nilai AKB dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

D. Angka Kematian Balita (AKba)

Kematian Anak Balita adalah kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 12 - 59 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Kematian Anak Balita di Kabupaten Boyolali tahun 2023 sejumlah 14 kasus yang disebabkan antara lain diare 3 kasus, demam berdarah 2 kasus, kelainan konginetal jantung 1 kasus, PD3I 4 kasus, kelainan kongenital lainnya 2 kasus, dan infeksi parasit 2 kasus.

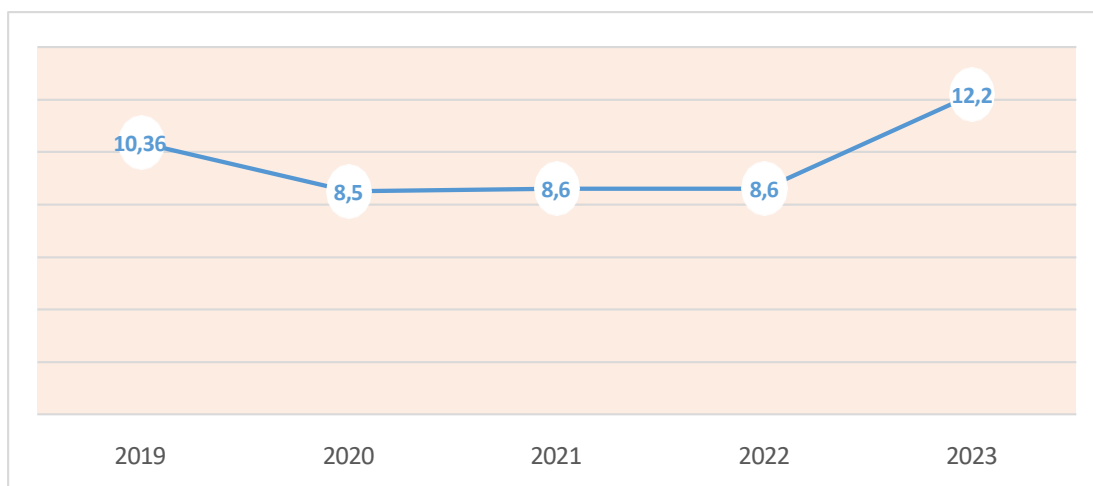
Grafik 6.7
Grafik Jumlah Kematian Anak Balita Per Puskesmas
Di Kabupaten Boyolali Tahun 2023



Sumber: Profil kesehatan kabupaten Boyolali tahun 2023

Sedangkan Angka Kematian Balita (AKBAL) merupakan jumlah balita usia 0 sampai 59 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah pada kurun waktu yang sama dikalikan 1.000/Kelahiran Hidup. Dari data kematian diatas, dapat dicari nilai AKBAL Kabupaten Boyolali tahun 2023 ini. Nilai AKBAL tahun 2023 ini mengalami peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

Gambar 6.8.
Grafik Angka Kematian Balita Di Kabupaten Boyolali
Tahun 2019-2023



Sumber: Profil kesehatan kabupaten Boyolali tahun 2023

E. STATUS GIZI BALITA

Masalah gizi di Indonesia yang terbanyak adalah gizi kurang. Anak balita (0-5 tahun) merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat kekurangan gizi atau termasuk salah satu kelompok masyarakat yang rentan gizi.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Menurut standar tersebut status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks:

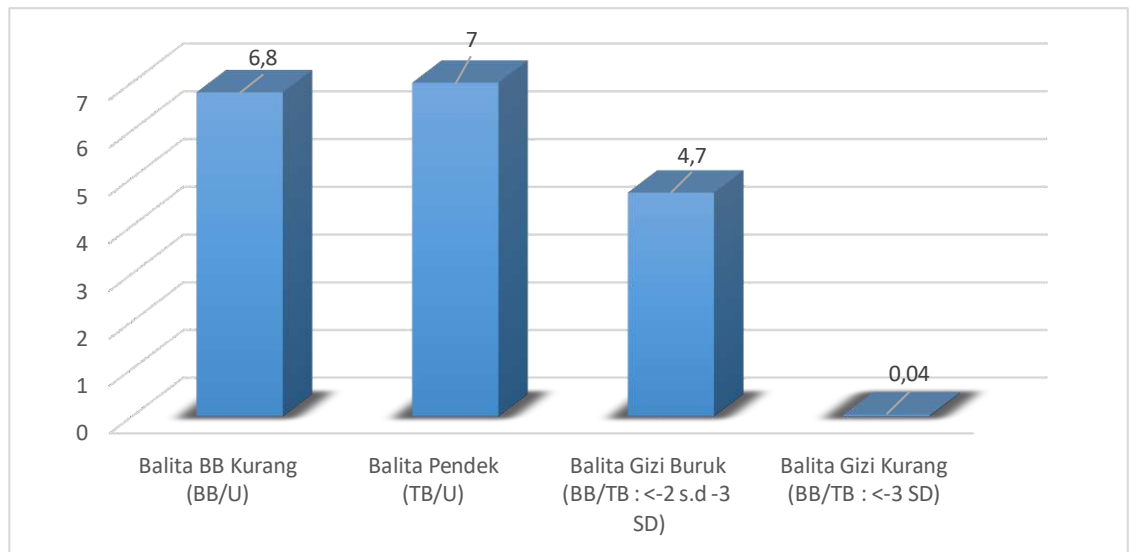
- 1). Berat badan menurut umur (BB/U)
- 2). Tinggi badan menurut umur (TB/U)
- 3). Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)

Balita Berat Badan Kurang yaitu Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -2 SD. Balita pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) yang merupakan gabungan dari istilah sangat pendek dan pendek dengan Z score < -2 standar deviasi.

Balita Gizi Kurang (BB/U) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan gabungan dari istilah gizi buruk dan gizi kurang dengan Z score < -2 standar deviasi. Balita Gizi Buruk (BB/TB) adalah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -3 SD.

Gambar 6.9.

Grafik Status Gizi Balita Dikabupaten Boyolali Tahun 2023



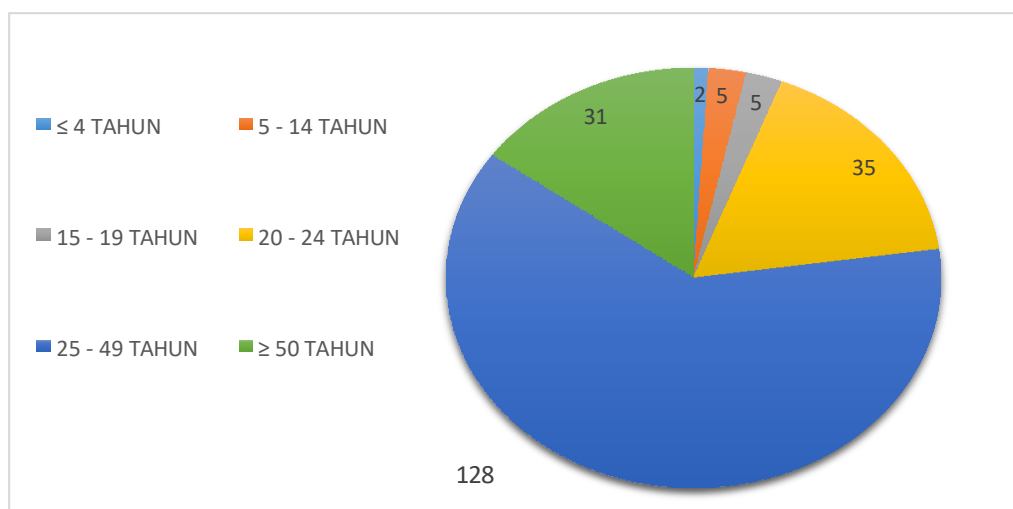
Sumber: Profil kesehatan kabupaten Boyolali tahun 2023

F. HIV (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)

Jumlah kasus HIV baru dikabupaten Boyolali tahun 2023 sebanyak 206 kasus ditemukan. Dari seluruh kasus ditemukan dapat disimpulkan bahwa penyakit HIV ini didominasi laki-laki yaitu sebanyak 145 orang atau sebesar 70,4%, sedangkan untuk Perempuan sebanyak 61 orang (29,6%). Dari seluruh kasus yang ditemukan juga dapat ditarik kesimpulan bahwa penderita terbanyak yaitu pada penduduk usia produktif.

Grafik 6.10

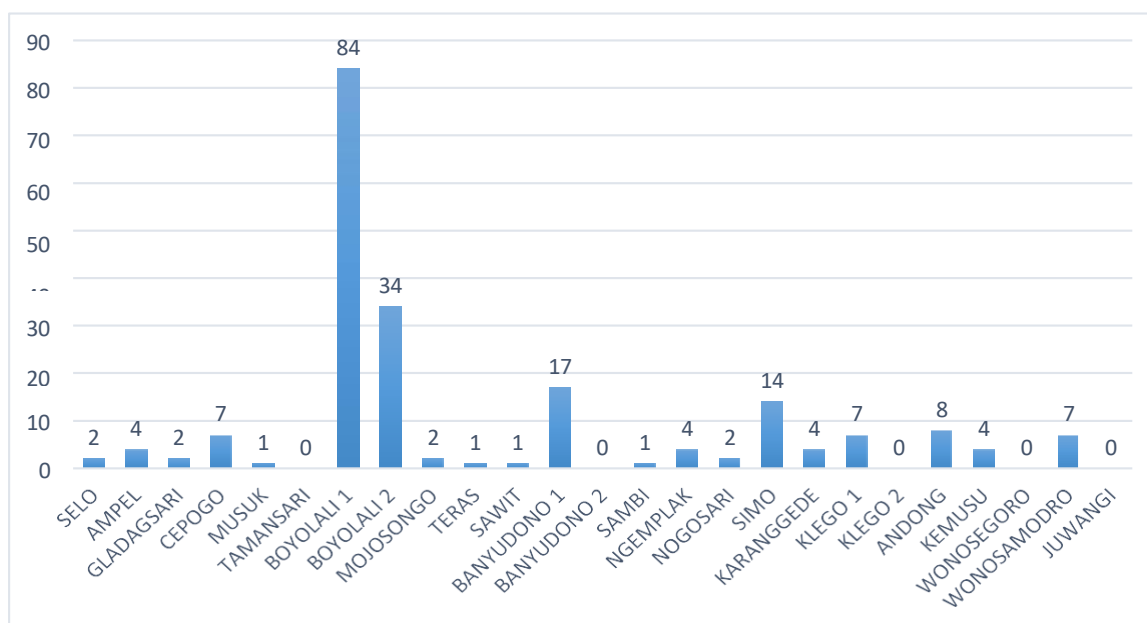
Grafik Proporsi HIV/AIDS per kelompok umur Kabupaten Boyolali Tahun 2023



Dari 206 ODHIV baru yang ditemukan tersebut sebanyak 107 orang sudah mendapatkan pengobatan ARV (51,9%). ODHIV baru paling banyak ditemukan di wilayah kecamatan Boyolali.

Grafik 6.11

Kasus Baru HIV yang ditemukan per Puskesmas Kabupaten Boyolali Tahun 2023



BAB VII



PENDIDIKAN

BAB VII

PENDIDIKAN

A. Partisipasi Sekolah

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), walaupun usaha peningkatan mutu SDM tidak hanya dilakukan melalui pendidikan khususnya pendidikan formal (sekolah). Tetapi sampai detik ini, Pendidikan masih dipandang sebagai sarana dan wahana utama untuk meningkatkan mutu SDM yang dilakukan secara sistematis dan berjenjang. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan mulai dengan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengakses pendidikan terutama pada tingkat dasar hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah program pendidikan gratis pada tingkat dasar di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak ada hambatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tersebut.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi. Masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Instansi Negeri lain maupun Instansi swasta.

Pada Tabel 7.1 terlihat bahwa sebagian besar (73,11 persen) penduduk usia 5 tahun ke atas sudah tidak bersekolah lagi, dan masih terdapat penduduk usia 5 tahun ke atas yang belum/tidak pernah menikmati pendidikan.

Penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah di perdesaan (6,51 persen) lebih tinggi daripada penduduk perkotaan (5,08 persen). Hal ini disebabkan akses pendidikan penduduk perkotaan jauh lebih baik dibandingkan dengan penduduk perdesaan, dan ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah perkotaan lebih lengkap serta lebih memadai dibandingkan daerah perdesaan.

Tabel 7.1

Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah Kabupaten Tahun 2023

Klasifikasi Desa/ Jenis Kelamin	Partisipasi Sekolah (%)			
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Perkotaan</u>				
Laki-laki	4,22	22,18	73,60	100
Perempuan	5,93	21,83	72,24	100
Laki-laki+ Perempuan	5,08	22,01	72,91	100
<u>Perdesaan</u>				
Laki-laki	5,15	20,69	74,16	100
Perempuan	7,85	19,66	72,49	100
Laki-laki +	6,51	20,17	73,32	100
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>				
Laki-laki	4,66	21,48	73,86	100
Perempuan	6,83	20,81	72,36	100
Laki-laki +	5,75	21,14	73,11	100

Sumber: Publikasi Statistik Pendidikan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah di daerah perkotaan (22,01 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (20,17 persen). Sedangkan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi di perkotaan sedikit lebih rendah (72,91 persen) dibanding perdesaan (73,32 persen).

Tabel 7.2

Persentase Penduduk Usia 5 - 24 Tahun menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah Kabupaten Boyolali Tahun 2023

Kelompok Umur	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5-6	84,20	15,80	-	100,00
7-12	0,30	99,57	0,13	100,00
13-15	0,27	97,08	2,65	100,00
16-18	0,16	70,87	28,97	100,00
19-24	0,47	24,59	74,94	100,00

Sumber: Publikasi Statistik Pendidikan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Faktor demografi lain yang berpengaruh terhadap akses masyarakat pada pendidikan adalah umur. Semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya (Tabel 7.2). Pada tabel tersebut sebesar 15,80 persen penduduk usia 5-6 tahun masih bersekolah, meskipun pada usia ini bukan merupakan usia wajib sekolah. Namun yang patut menjadi perhatian adalah masih adanya penduduk usia sekolah, tetapi sudah tidak bersekolah lagi. Pada kelompok umur wajib belajar 9 tahun (kelompok 7-15 tahun) sekitar tiga persen tidak bersekolah lagi, hal ini mengindikasikan adanya anak putus sekolah pada kelompok umur tersebut. Kurang dari satu persen anak usia 7-15 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah. Meskipun angkanya relatif kecil, namun perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan pendidikan untuk semua bisa tercapai.

B. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan, misalnya pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung disetiap jenjang sekolah. Naiknya jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

Tabel 7.3

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Klasifikasi Desa, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2023

Klasifikasi Desa / Jenis Kelamin	Kelompok Umur (Tahun)			
	7-12	13-15	16-18	19-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Perkotaan</u>				
Laki-laki	99,59	97,27	71,99	29,67
Perempuan	99,82	98,28	74,80	34,43
Laki-laki+Perempuan	99,70	97,75	73,36	32,03
<u>Perdesaan</u>				
Laki-laki	99,23	94,30	68,84	19,77
Perempuan	99,62	98,28	67,35	19,61
Laki-laki+Perempuan	99,42	96,28	68,14	19,69
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>				
Laki-laki	99,42	95,94	70,46	25,16
Perempuan	99,73	98,28	71,31	27,94
Laki-laki+Perempuan	99,57	97,08	70,87	26,52

Sumber: Publikasi Statistik Pendidikan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Secara umum pada tahun 2023, angka partisipasi sekolah perempuan lebih besar daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami masalah kesenjangan gender pada bidang pendidikan. APS di perkotaan untuk seluruh kelompok umur 7–23 tahun relatif lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan, baik bagi penduduk laki-laki maupun perempuan.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penduduk perkotaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Terutama kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi, dimana nilai APS pada kelompok umur 19–23 di perkotaan (32,03 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan APS kelompok umur 19–23 di perdesaan (19,69 persen). Hal ini diduga disebabkan oleh tersedianya fasilitas pendidikan tinggi di perkotaan yang jauh lebih baik daripada di daerah perdesaan.

Tabel 7.4

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Boyolali Tahun 2022- 2023

Kabupaten	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Boyolali					
	Sekolah Menengah Atas (SMA)		Sekolah Menengah Pertama (SMP)		Sekolah Dasar (SD)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kabupaten Boyolali	58,26	56,20	82,84	82,21	96,07	98,63

Angka Partisipasi sekolah menengah atas mengalami penurunan yang cukup signifikan tahun 2022 dari 58,26 menjadi 56,20 ditahun 2023. Angka Partisipasi sekolah menengah pertama juga mengalami penurunan yang cukup bermakna tahun 2022 dari 82,84 menjadi 82,21 ditahun 2023. Pada level Sekolah Dasar mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari 96,07 tahun 2022 menjadi 98,63 pada tahun 2023.

C. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS merupakan indikator makro yang perhitungannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS). HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Tabel 7.5

**Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Boyolali Tahun
2022 - 2023**

Kabupaten	Angka Harapan Lama Sekolah [Metode Baru](Tahun) (Tahun)	
	2023	2022
Kabupaten Boyolali	12,66	12,62

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di kabupaten Boyolali mengalami kenaikan dari tahun 2022 12, 62 menjadi 12,66 pada tahun 2023.

BAB VIII



PEMERINTAHAN DAN POLITIK

BAB VIII

PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. Strong)

Pemerintahan dalam arti luas juga diartikan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki / Kerajaan, Persemakmuran (Commonwealth). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut / Mutlak.

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KABUPATEN BOYOLALI

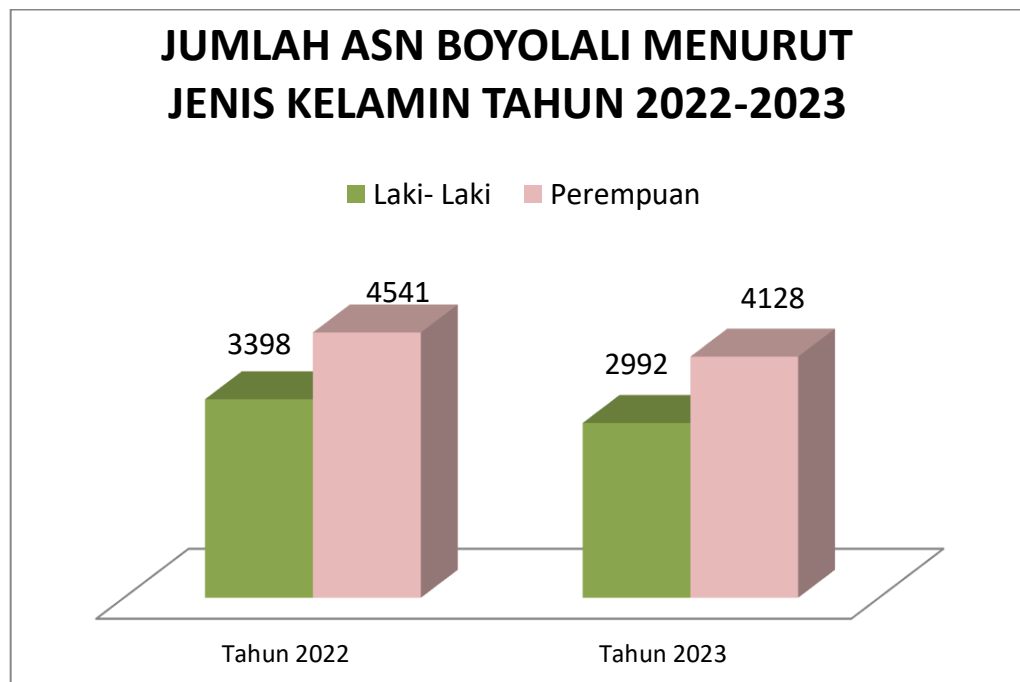
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah. ASN memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Tugas dan fungsi ASN meliputi: Melaksanakan kebijakan publik, Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aparatur Negara adalah alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aparatur Negara sebagai penyelenggara pemerintahan diberikan tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat.

A. Data ASN Menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali

Grafik 8.1

Jumlah ASN Kab Boyolali berdasarkan jenis kelamin tahun 2022-2023



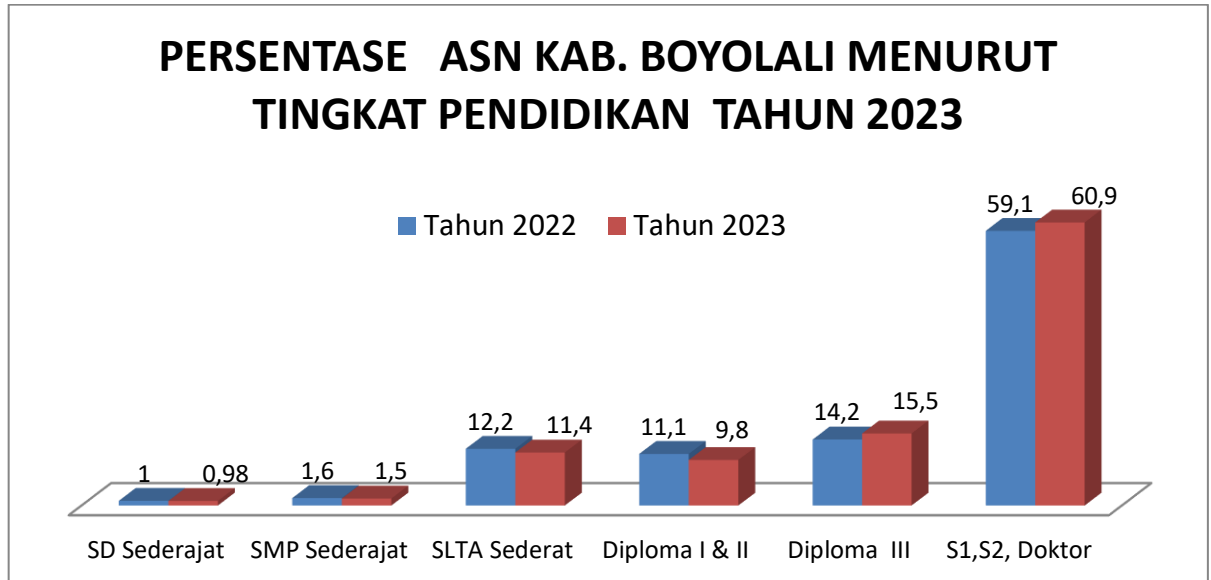
Sumber Kabupaten Boyolali dalam angka

Berdasarkan grafik 8.1 menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara secara keseluruhan didominasi oleh jenis kelamin Perempuan pada Tahun 2022 sejumlah 4541 orang dari total ASN 7939 orang maupun tahun 2023 jumlah ASN perempuan 4128 dari total ASN 7120 orang.

B. Persentase ASN di Lingkungan Kab. Boyolali Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023

Grafik 8.2

Grafik presentase ASN Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Boyolali Tahun 2023



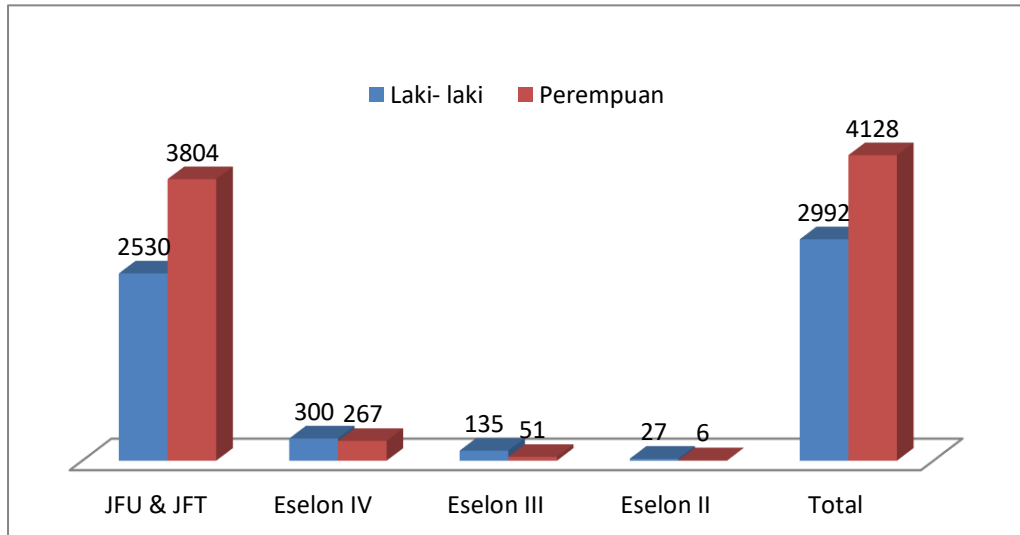
Sumber Kabupaten Boyolali dalam angka

Pada tahun 2023, Kabupaten Boyolali dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publiknya ditenagai oleh 7.120 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari jumlah tersebut, sekitar 60,9 persen memiliki tingkat pendidikan sarjana atau lebih tinggi. PNS dengan tingkat pendidikan SMA atau jenjang bawahnya, masih sekitar 13,86 persen. Dibandingkan dengan tahun 2022 tingkat pendidikan sarjana sampai dengan doktor mengalami kenaikan sedangkan tingkat pendidikan SMA atau jenjang bawahnya.

C. Persentase Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Menurut Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Grafik 8.3

Data Pejabat di Lingkungan Kabupaten Boyolali Menurut Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2023



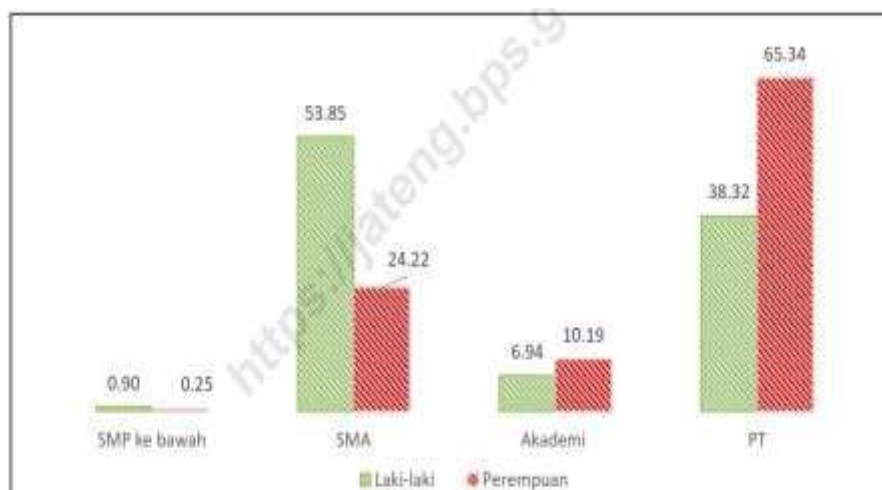
Sumber: Kabupaten Boyolali dalam angka

Berdasarkan Grafik 8.3 di atas, Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, lebih didominasi perempuan dibanding laki-laki. Namun yang menduduki jabatan eselon IV, eselon III dan Eselon II lebih banyak ASN laki-laki dibanding perempuan.

D. Persentase Kepala Desa/ Lurah Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Grafik 8.4

Persentase Kepala Desa/ Lurah Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Potensi Desa Tahun 2022

Berdasarkan Grafik 8.4 di atas, Persentase kepala desa/ lurah perempuan yang berpendidikan akademi maupun perguruan tinggi lebih banyak dibanding laki-laki.

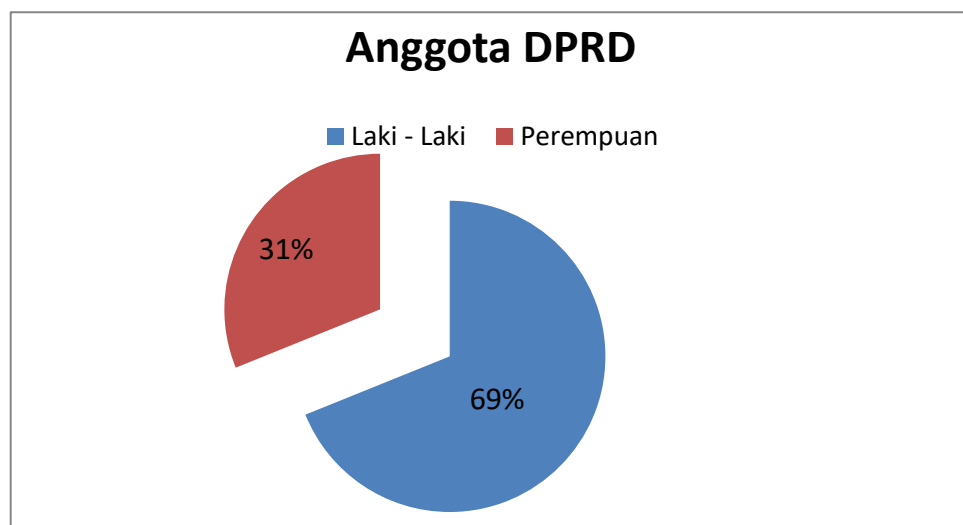
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD merupakan salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali adalah lembaga legislatif yang berkedudukan di Kabupaten Boyolali dan memiliki 45 anggota.

E. Persentase Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

Grafik 8.5

Persentase Anggota DPRD Kab. Boyolali Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023



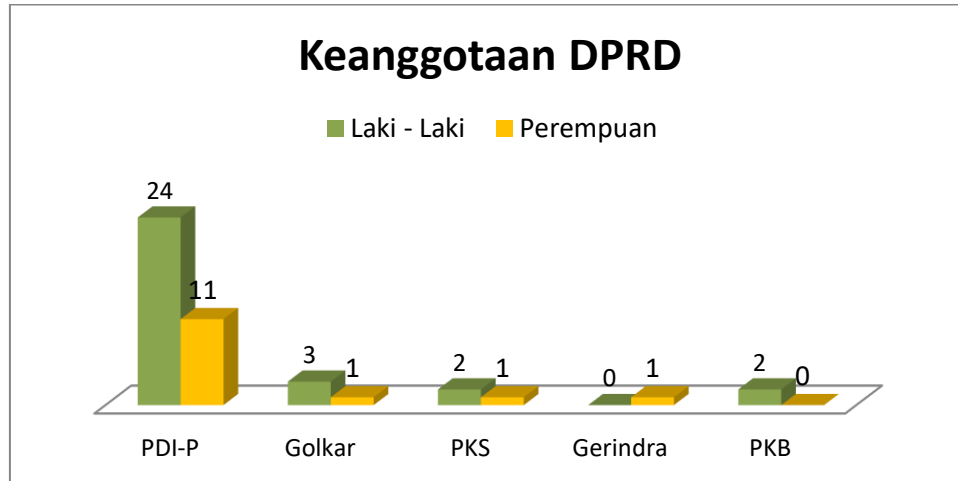
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2023

Berdasarkan Grafik 8.5 di atas, Persentase Anggota DPRD laki-laki sebesar 69 persen. Sedangkan perempuan sebesar 31 persen, artinya keterwakilan 30 persen perempuan di DPRD Kabupaten Boyolali sudah terpenuhi.

F. Jumlah Anggota DPRD menurut partai politik di Kabupaten Boyolali Tahun 2023

Grafik 8.6

Jumlah Anggota DPRD menurut partai politik di Kabupaten Boyolali Tahun 2023



Sumber: Sekretaris Dewan Kab. Boyolali Tahun 2023

Berdasarkan Grafik 8.5 di atas, Sudah terdapat partai politik yang mempunyai wakil anggota berjenis kelamin perempuan sebesar 30 persen di DPRD di Kabupaten Boyolali.

BAB IX



PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB IX

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Hak-hak tersebut diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bertujuan untuk:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan;
2. Memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
3. Mewujudkan kewajiban Pemerintah Daerah;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan; dan
5. Mewujudkan kehidupan sosial yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

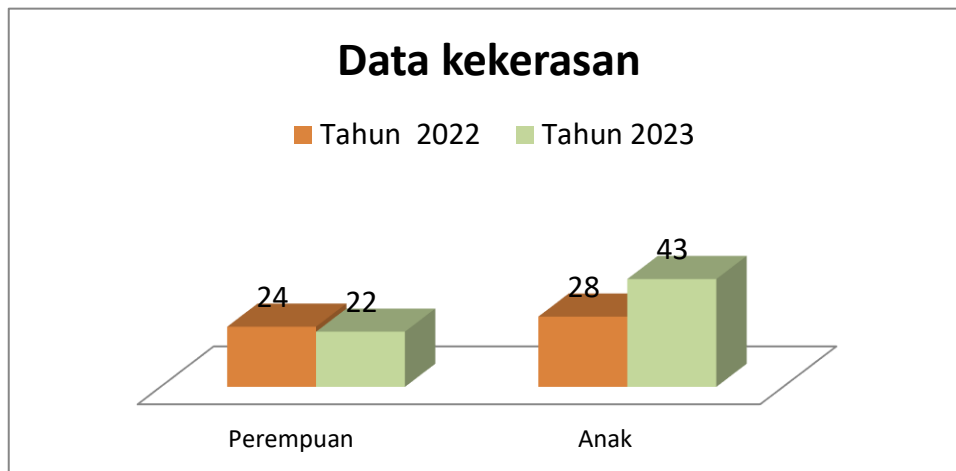
P2TP2A singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak, merupakan Unit Pelaksana Teknis DP2KBP3A yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kabupaten Boyolali berdasarkan layanan pengaduan dari masyarakat.

P2TP2A menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara terintegrasi dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelapor, korban, pelaku, sebagai privasi yang sangat rahasia setiap hari jam kerja dengan berkolaborasi dengan unit terkait. Kasus yang ditangani juga dilakukan sistem pencatatan dan pelaporan berjenjang dengan aplikasi simfoni kementerian PPPA

A. Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kab Boyolali Tahun 2022-2023

Grafik 9.1

Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
Kabupaten Boyolali Tahun 2022-2023



Sumber: P2TP2A Kabupaten Boyolali

Berdasarkan grafik 9.1 menggambarkan bahwa jumlah korban kekerasan pada perempuan tahun 2022 mengalami penurunan 2 korban dari Tahun 2023. Sedangkan Kasus kekerasan pada Anak pada tahun 2023 mengalami kenaikan cukup memprihatinkan yaitu 15 kasus dibanding tahun 2022

Grafik 9.2

Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak menurut Kecamatan dan Jenis Kekerasan
Kab Boyolali Tahun 2023

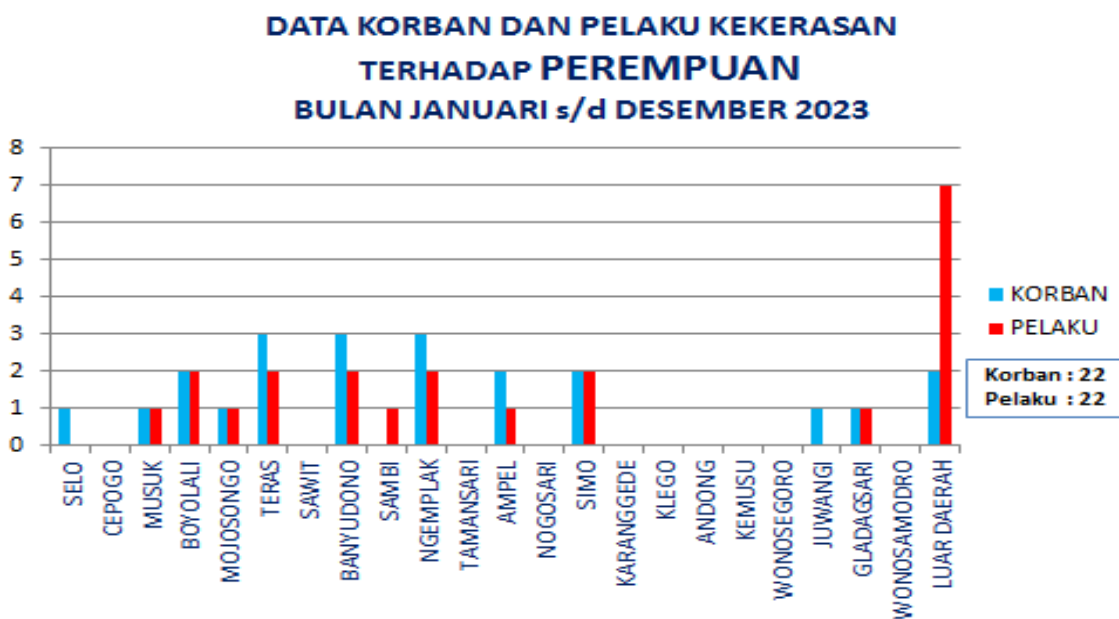


Sumber: P2TP2A Kabupaten Boyolali

Berdasarkan grafik 9.2 memberi gambaran bahwa jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak Kabupaten Boyolali yang melapor ke P2TP2A ada 56 Kasus kekerasan dan 100% ditangani. Kecamatan Boyolali menduduki kecamatan tertinggi kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan 8 kasus meliputi kekerasan seksual, Kekerasan dalam Rumah Tangga serta kekerasan fisik dan psikis. Ada 4 Kecamatan yang tidak ada laoran kasus kekerasan yaitu kecamatan klego, Tamansari ,wonosegoro dan wonosamodra. Berdasarkan jenis kekerasan, tindak pelecehan sexual adalah kekerasan terbanyak dengan 23 kasus, diikuti tindak kekerasan KDRT dan terbanyak ke tiga adalah tindak kekerasan fisik dan psikis.

Grafik 9.3

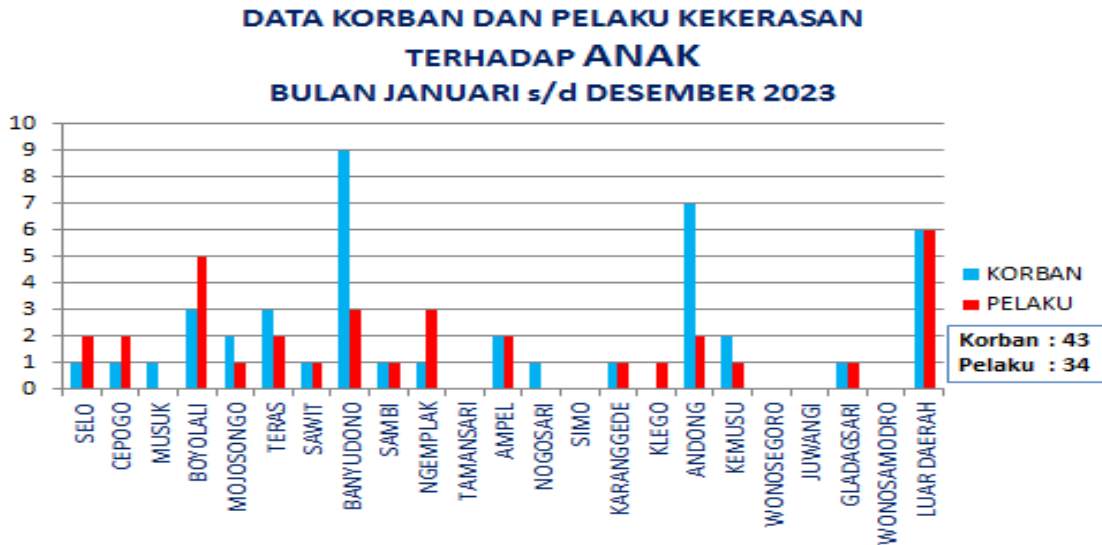
Data perempuan korban kekerasan menurut kecamatan di Kabupaten Boyolali Tahun 2023



Sumber: P2TP2A Kabupaten Boyolali

Grafik 9.3 menggambarkan kejadian kekerasan pada Perempuan Kabupaten Boyolali tahun 2023 dengan jumlah 22 korban dengan sebagian besar pelaku adalah orang luar Kabupaten Boyolali. Kecamatan teras, Banyudono dan Ngemplak sama – sama ada 3 korban kekerasan pada perempuan.

Grafik 9.4
Data Anak korban kekerasan menurut kecamatan
di Kabupaten Boyolali Tahun 2023

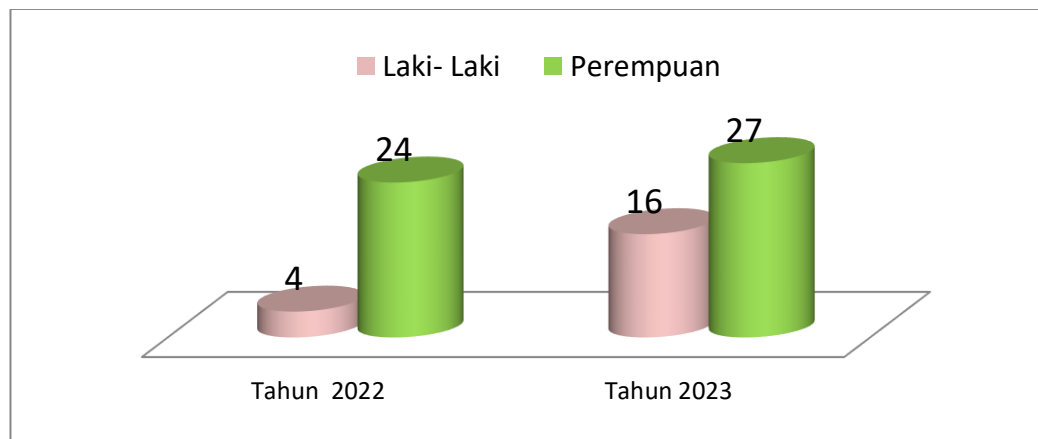


Sumber: P2TP2A Kabupaten Boyolali

Grafik 9.4 menggambarkan kejadian kekerasan pada Anak Kabupaten Boyolali tahun 2023 dengan jumlah 43 korban dan jumlah pelaku 34, data itu menggambarkan bahwa dimungkinkan 1 pelaku melakukan tindak kekerasan pada lebih dari 1 anak. Kecamatan dengan jumlah kasus terbanyak adalah kecamatan Banyudono dengan 9 Kasus, selanjutnya kecamatan Andong dengan 7 kasus yang ketiga adalah kecamatan Kota Boyolali dengan 3 korban anak.

Berdasarkan konsep wilayah ada 6 korban anak dari luar boyolali namun Pelakunya adalah orang Boyolali, sebaliknya ada 6 pelaku tindak kekerasan dari luar Kab. Boyoali yang melakukan tindak kekerasan kepada anak di wilayah Kab. Boyolali.

Grafik 9.5
Data Anak korban kekerasan menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Boyolali Tahun 2023



Sumber: P2TP2A Kabupaten Boyolali

Berdasarkan grafik 9.5 memberikan gambaran bahwa anak perempuan sangat rawan menjadi korban tindak kekerasan dibanding anak laki – laki. Pada tahun 2022 jumlah korban kekerasan pada anak ada 28 meliputi 24 korban anak perempuan dan 4 anak laki-laki, begitupula pada tahun 2023 jumlah korban kekerasan pada anak perempuan ada 27 sedangkan korban anak laki-laki ada 16 anak.

B. Rasio Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (Per 100.000 Penduduk)

Tabel 9.1

Rasio Korban Kekerasan Perempuan Dewasa dan Anak
Kabupaten Boyolali Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Rasio Korban Kekerasan	
		Perempuan Dewasa	Anak
	Kabupaten Boyolali	3,91	9,07
	Provinsi Jawa Tengah	4,38	10,33

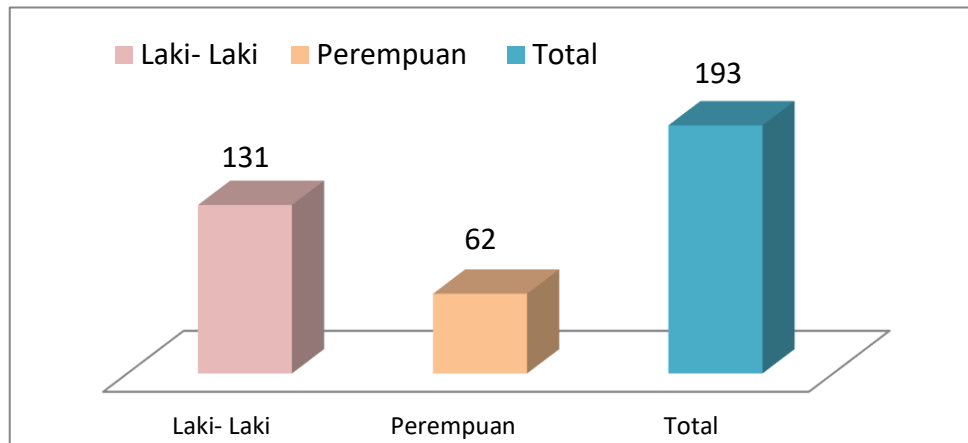
Sumber: Buku Profil Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Berdasarkan Grafik 9.6 di atas, Rasio Kekerasan Perempuan Dewasa di Kabupaten Boyolali lebih rendah 0,47 daripada rasio korban kekerasan perempuan di tingkat Provinsi, begitu juga Rasio Kekerasan Anak di Kabupaten Boyolali juga lebih rendah 1,26 dari pada tingkat Provinsi Jawa tengah.

C. Penyandang Disabilitas Anak

Grafik 9.6

Data penyandang disabilitas Anak Kabupaten Boyolali berdasarkan jenis kelamin Tahun 2023



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Tahun 2023

Berdasarkan Grafik 9.7 di atas, di Kabupaten boyolali total 193 anak penyandang disabilitas, dari jumlah tersebut paling banyak dialami oleh anak dengan jenis kelamin laki – laki sebanyak 131 anak, sedangkan anak perempuan penyandang disabilitas sejumlah 62 anak.

D. Anak Berhadapan Hukum

Tabel 9.2

DATA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
MENURUT POLRES BOYOLALI TAHUN 2022

NO		JUMLAH	TINDAK PIDANA					KET
			ANIAYA/ ANIAYA BERAT	SETUBUH/ CABUL	CURAT/CUR AS/ CURANMOR	NARKO BA	TINDAK PIDANA LAINNYA	
1.	KORBAN	21	-	20	1	-	-	
2.	SAKSI	14	7	2	3	-	2	
3.	PELAKU	10	6	2	2	-	-	
JUMLAH		45	13	24	6	-	4	

Sumber: UPT PPA Polres Kab Boyolali tahun 2023

tabel 9.3

**DATA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
MENURUT POLRES BOYOLALI TAHUN 2023**

NO		JUMLAH	TINDAK PIDANA					KET
			ANIAYA/ ANIAYA BERAT	SETUBUH/ CABUL	CURAT/CURA S/ CURANMOR	NARKOB A	TINDAK PIDANA LAINNYA	
1.	KORBAN	21	3	21	-	-	-	
2.	SAKSI	18	10	2	1	-	5	
3.	PELAKU	2	8	2	8	-	5	
JUMLAH		41	21	25	9	-	10	

Sumber: UPT PPA Polres Kab Boyolali tahun 2023

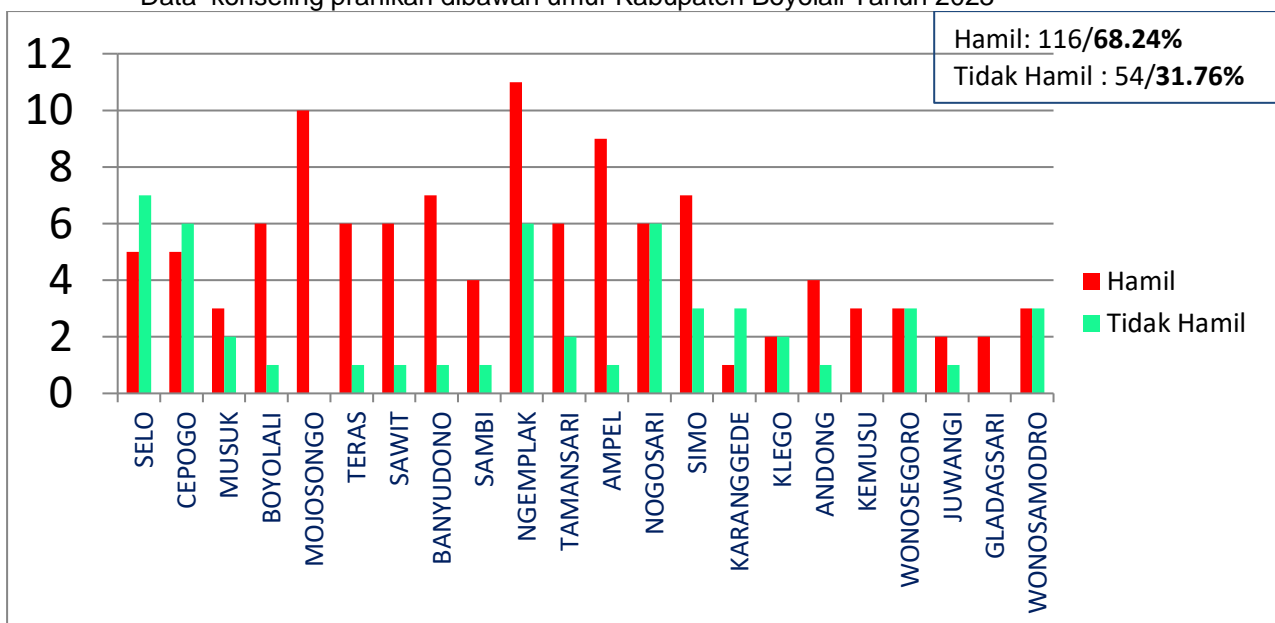
Berdasarkan Grafik 9.7 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah anak berhadapan dengan hukum di Boyolali tahun 2023 adalah sebesar 41 kasus, paling banyak adalah kasus kekerasan sexual 25 kasus., penganiayaan 21 kasus pencurian 9 kasus dibandingkan jumlah kasus tahun 2022 mengalami penurunan sejumlah 3 kasus.

E. Perkawinan Usia dibawah 19 Tahun

Perkawinan anak adalah perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 19 tahun. Sebagian besar perkawinan anak terjadi pada anak perempuan dengan laki-laki dewasa.^[1] Pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022^[2] tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, terdapat batasan usia anak. Usia anak yang dimaksud adalah 19 tahun.^[3] Dengan demikian, anak-anak secara otomatis tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan, sehingga perkawinan anak dianggap menyalahi aturan pernikahan yang mengharuskan persetujuan secara sadar dari kedua belah pihak.

Grafik 9.7

Data konseling pranikah dibawah umur Kabupaten Boyolali Tahun 2023



Sumber data P2TP2A Kab Boyolali

Berdasarkan data di tabel; 9,4 dapat memberikan gambaran bahwa kasus anak dibawah umur yang berupaya nikah resmi makin banyak yaitu 170 pasangan, Dan dari 170 pasang 116 sudah kondist sudah hamil butuh koordinasi untuk pengananan lebih lanjut terkait proses kemamilan persalinan dan program cegah stunting.

Kecamatan dengan kasus menikah usia dini tertinggi adalah Puskesmas Ngemplak, Mojosongo Ampel dan Kecamatan Selo. Sedangkan kematan yang kasusnya rendah adalah Juwangi dan Karanggede.

F. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah izin yang diberikan pengadilan kepada calon pengantin yang belum memenuhi batas usia untuk menikah. Dispensasi nikah diajukan oleh orang tua atau wali calon pengantin ke Pengadilan Agama untuk calon pengantin beragama Islam, atau ke Pengadilan Negeri untuk calon pengantin beragama non-Islam.

Dispensasi nikah diberikan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

- Pencegahan perkawinan anak
- Pertimbangan moral, agama, adat, dan budaya
- Aspek psikologis
- Aspek kesehatan
- Dampak yang ditimbulkan

Beberapa persyaratan yang perlu disiapkan untuk mengajukan dispensasi nikah, antara lain:

- Surat permohonan
- Fotokopi KTP kedua orang tua/wali
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak
- Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri
- Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak

BAB X



PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

BAB X

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Keluarga Berencana menurut UU No. 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera), adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Keluarga Berencana merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Perlu diketahui, Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah dianggap masyarakat dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan dapat dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Contohnya seperti pil KB, kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

Tujuan Keluarga Berencana

Pasangan yang menggunakan KB biasanya memiliki tujuan masing-masing. Perlu diketahui, KB tidak hanya dilakukan untuk menekan jumlah kelahiran bayi. Berikut ini beberapa tujuan KB:

1. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengendalikan kelahiran dan menjamin terkendalinya penduduk.
2. Membentuk keluarga kecil sejahtera, sesuai dengan kondisi ekonomis sebuah keluarga.
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi.
4. Menganangkan keluarga kecil dengan hanya dua anak.
5. Mencegah pernikahan di usia dini.
6. Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia terlalu muda atau terlalu tua.
7. Menekan jumlah penduduk dan menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia.
8. Meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan mengendalikan kelahiran.

Dalam penerapannya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menyosialisasikan dan mendorong masyarakat untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Misalnya pil KB, kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

Ada beragam manfaat program KB bagi pasangan suami istri, antara lain:

1. Menekan kehamilan yang tidak diinginkan

Alat kontrasepsi berfungsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Alat kontrasepsi juga berfungsi untuk menurunkan risiko melahirkan di usia terlalu muda atau terlalu tua.

Jika perempuan yang terlalu muda dan belum menopause melakukan hubungan intim tanpa menggunakan alat kontrasepsi, maka ada kemungkinan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Sementara itu, melahirkan di atas usia 35 tahun dapat berisiko pada wanita dan menyebabkan kematian.

2. Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh anak yang baik

Apabila anak yang belum berusia satu tahun sudah memiliki adik, maka tumbuh kembangnya berisiko terganggu. Normalnya, jarak anak pertama dan kedua antara 3 hingga 5 tahun. Jika anak yang belum berusia 2 tahun sudah memiliki adik, maka ASI untuk anak pertama tidak bisa penuh 2 tahun. Hal tersebut memungkinkan anak mengalami gangguan kesehatan.

Sementara itu, orang tua yang memiliki dua anak akan mengalami kesulitan membagi waktu. Sehingga anak yang lebih besar akan kurang perhatian. Padahal, anak masih membutuhkan perhatian penuh dari kedua orang tuanya.

3. Mencegah gangguan kesehatan mental keluarga

Sebagian wanita berisiko mengalami depresi setelah melahirkan. Depresi biasanya hilang jika ibu mendapatkan dukungan dari pasangan. Jika terjadi kelahiran anak dengan jarak dekat, maka risiko depresi akan meningkat. Depresi juga dapat terjadi pada ayah, jika belum siap secara fisik dan mental. Kedua kondisi tersebut dapat dicegah dengan melakukan program KB. Jika kehamilan diatur sedemikian rupa, pasangan suami istri bisa hidup lebih sehat

dan sejahtera. Sementara itu anak dapat tumbuh secara maksimal dan perencanaan kehamilan akan berjalan matang.

4. Mengurangi angka kematian bayi dan ibu

Perlu dipahami, KB dapat mencegah kehamilan dan kelahiran yang berjarak dekat dan tidak diinginkan. Dengan begitu angka kematian bayi juga dapat berkurang. Ibu meninggal akibat melahirkan dan disertai kesehatan yang buruk juga dapat dihindari.

5. Mencegah gangguan kesehatan reproduksi

Hamil di usia terlalu muda, terlalu tua, atau kehamilan yang berjarak terlalu dekat dapat menimbulkan risiko. Ibu hamil dapat mengalami masalah selama kehamilan, seperti hipertensi, preeklamsia, persalinan prematur, dan sebagainya. Adanya program KB, kehamilan dapat direncanakan dengan lebih baik, sehingga risiko gangguan kesehatan reproduksi dapat dicegah.

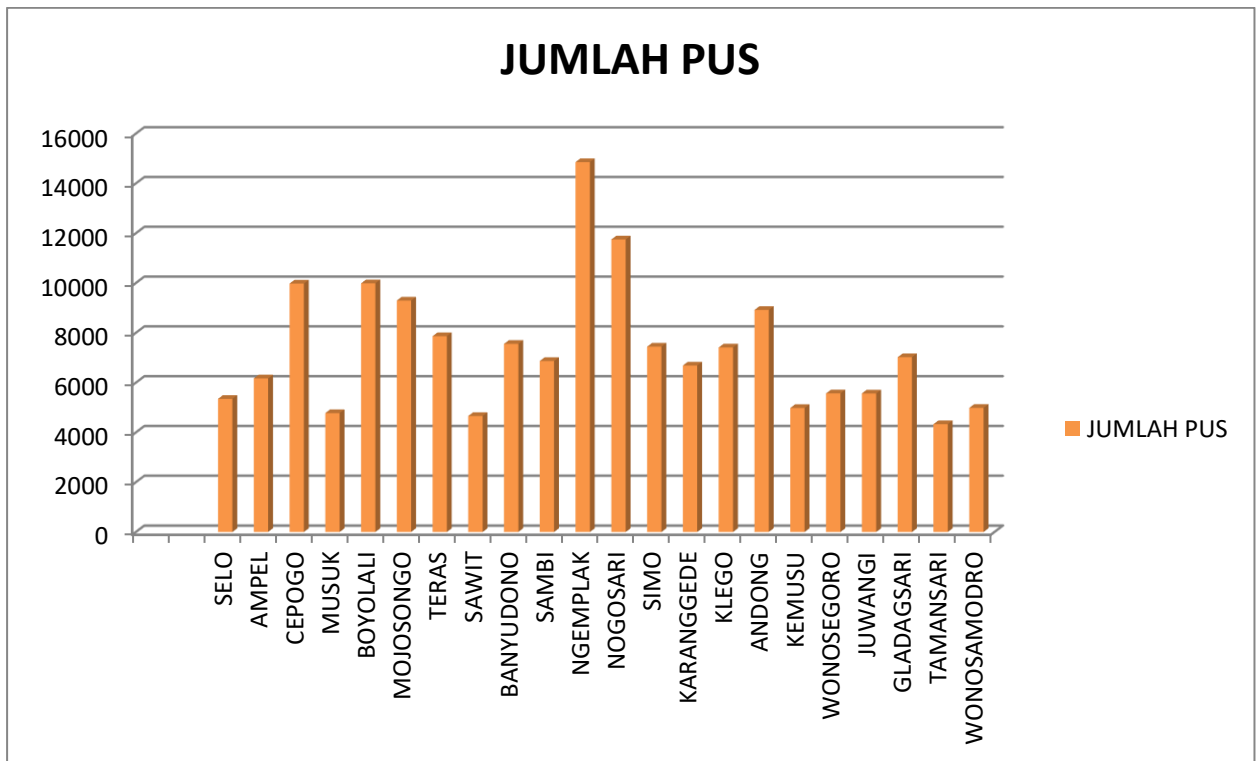
6. Mencegah terjadinya penyakit menular seksual

Hubungan seksual tidak terlepas dari risiko terjadinya penyakit menular seksual, meskipun dilakukan antara suami istri. Penyakit menular seksual (PMS) ini yaitu sifilis, gonore, hingga HIV/AIDS. PMS dalam dicegah dengan penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom.

A. Pasangan Usia Subur

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan).

Grafik 10.1
Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan Kecamatan di
Kabupaten Boyolali Tahun 2023



Sumber: Data SIGA DP2KBP3A Kab Boyolali Tahun 2023

Berdasarkan grafik 10,1 kecamatan dengan PUS tertinggi tahun 2023 adalah kecamatan Ngemplak , tertinggi ke dua adalah kecamatan Nogosari, namun kecamatan dengan jumlah PUS terendah adalah Kecamatan Tamansari

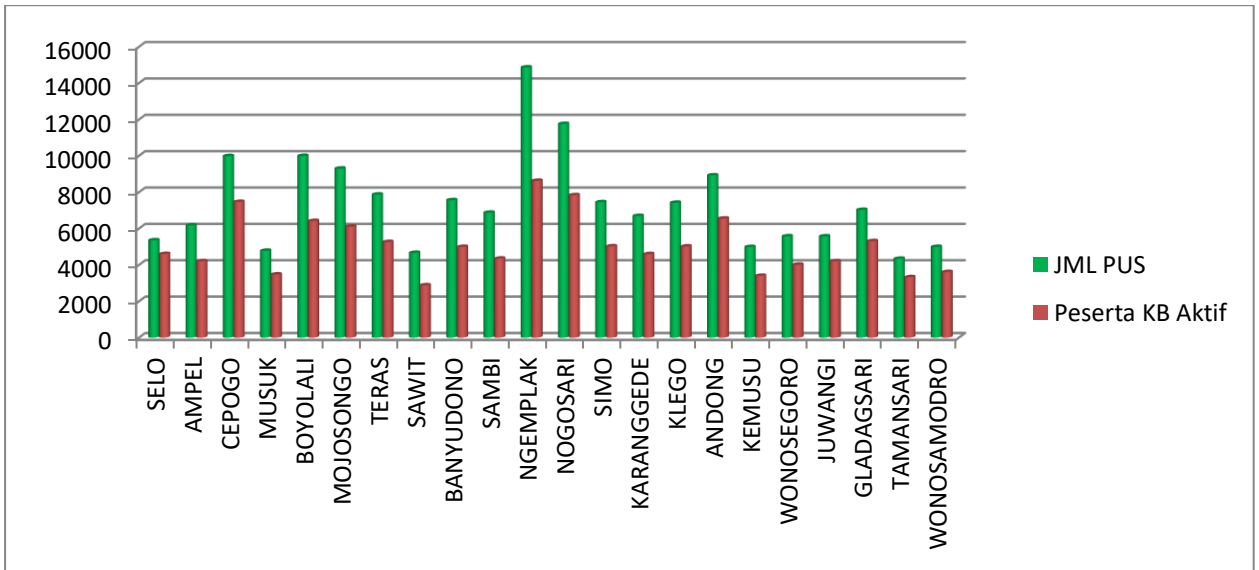
B. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase.

Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial.

Grafik 10.2

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Kabupaten Boyolali tahun 2023



Sumber: Data SIGA DP2KBP3A Kab Boyolali Tahun 2023

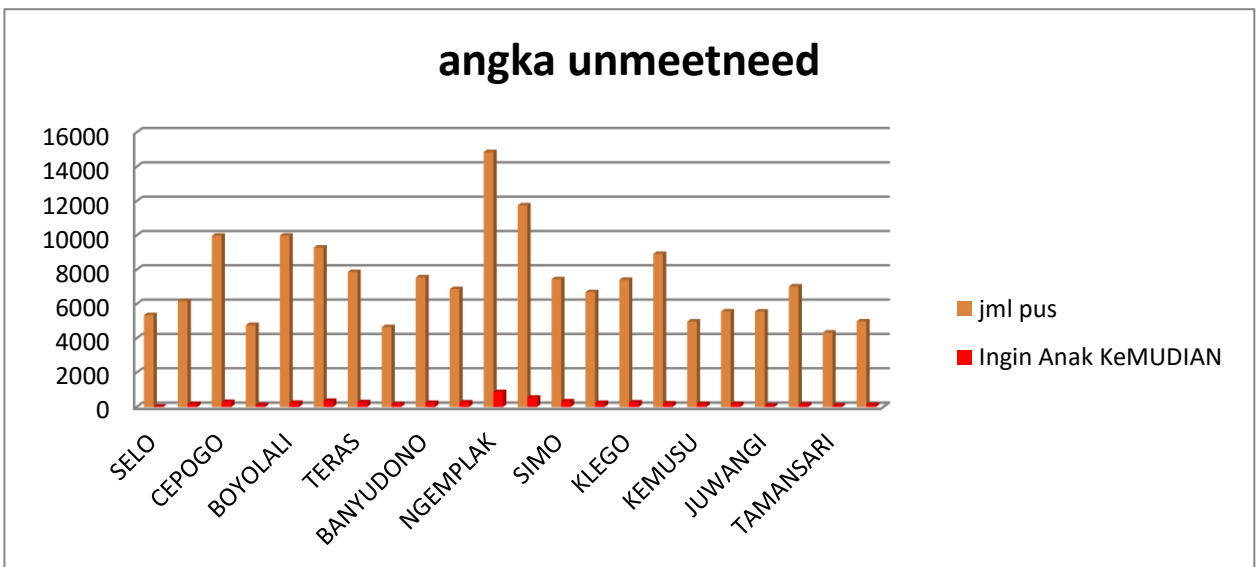
Berdasarkan Grafik 10.2 di atas, dapat dilihat bahwa peserta KB aktif tertinggi adalah kecamatan Ngemplak, diikuti kecamatan Selo, sedangkan kecamatan dengan peserta KB aktif terendah adalah kecamatan Nogosari.

C. Unmeetneed KB

Unmet need KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mestinya KB tetapi belum terlayani atau tidak ikut KB karena berbagai alasan. Unmet need ini terdiri dari PUS yang Ingin Anak di Tunda (IAT) dan PUS yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL).

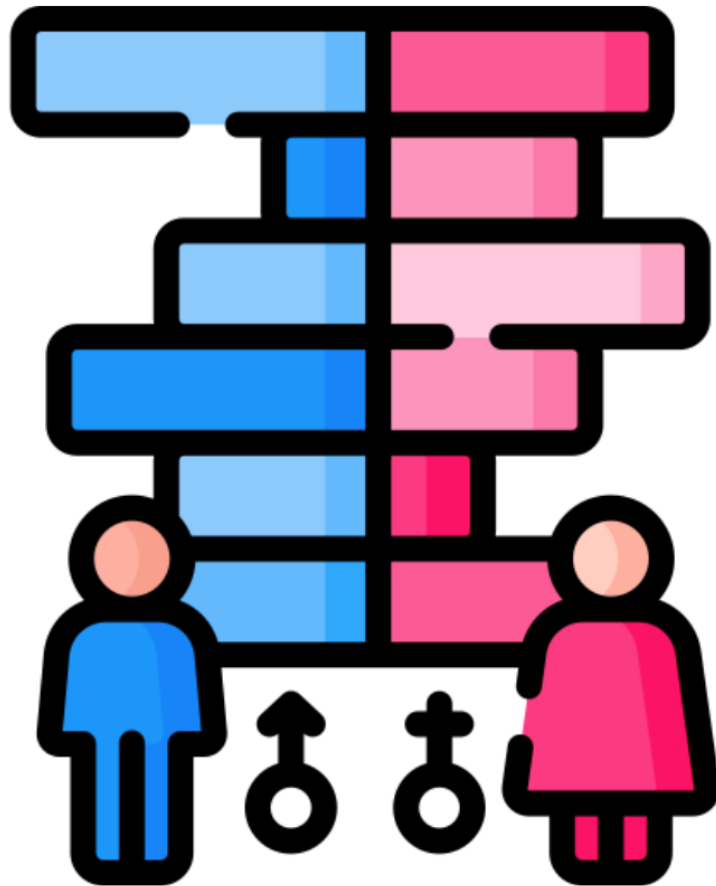
Grafik 10.3

Data angka unmeetneet kabupaten Boyolali Tahun 2023 menurut Kecamatan



Sumber: Data SIGA DP2KBP3A Kab Boyolali Tahun 2023

BAB XI



ANGGARAN RESPONSIF GENDER

BAB XI

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Dengan mengadopsi PPRG, kita mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, persoalan dan perspektif yang berbeda. Oleh karenanya keduanya harus dilibatkan dalam pembangunan, agar tercipta Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) yang merata demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Perencanaan dan anggaran yang dibuat dalam pembangunan akan memiliki dampak yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu penting untuk memasukkan analisis gender ke dalamnya. Ketika mengadopsi PPRG, dimana pemahaman menyeluruh tentang permasalahan yang khas perempuan dan laki-laki menjadi sebuah keharusan. Transparansi anggaran, tekad yang kuat mendengarkan kebutuhan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, juga menjadi hal yang mutlak.

A. ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Anggaran responsif gender (ARG) adalah strategi untuk mengintegrasikan isu gender dalam proses penganggaran. ARG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan fiskal.

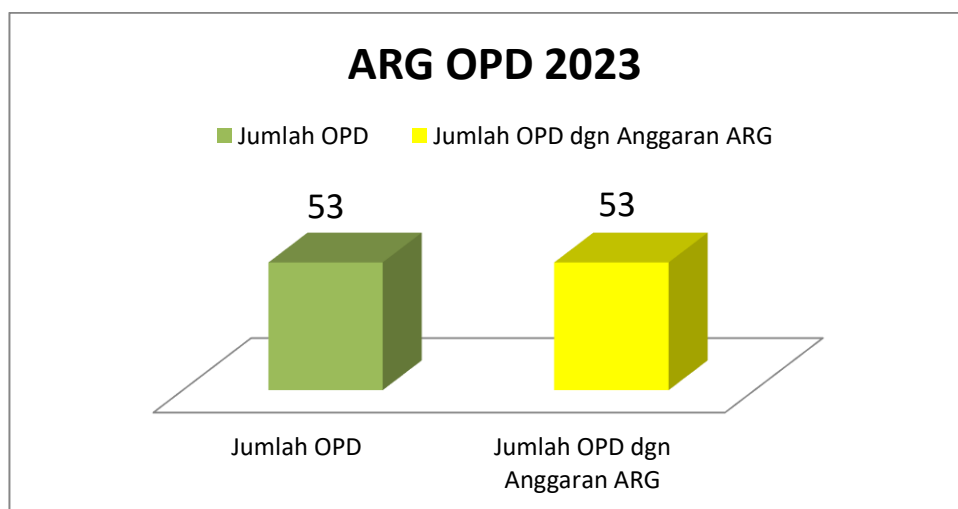
ARG memiliki beberapa karakteristik, di antaranya: Bukan anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, Menjamin distribusi sumber daya yang adil, Memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, Memperkuat akuntabilitas pemerintah, Mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

ARG dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: Anggaran gender spesifik, Alokasi anggaran untuk meningkatkan kesempatan setara dalam pekerjaan, Alokasi anggaran untuk kepentingan umum.

Untuk menyusun ARG, digunakan data terpilah gender dan Gender Analysis Pathway (GAP). Hasilnya kemudian dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS)

B. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MELAKSANAKAN PPRG

Grafik 11.1
Data OPD yang menyusun anggaran Resposif Gender



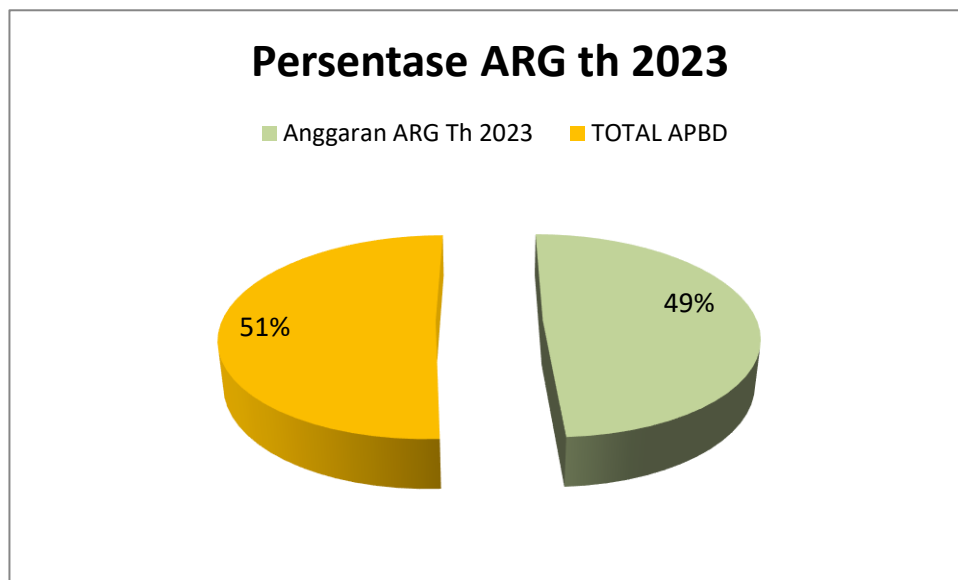
Berdasarkan grafik 11,1 menunjukkan bahwa kabupaten Boyolali terdiri dari 53 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri 22 Kecamatan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 3 RSUD dan 26 Dinas dan Badan. Selanjutnya dari 53 Organisasi Perangkat Daerah tersebut semua sudah melaksanakan PPRG dengan menyusun dokumen ARG.

C. PERSENTASE ANGGARAN RESPONSIF GENDER DIBANDING TOTAL APBD

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menetapkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang didalamnya telah memuat Indikator Kinerja Utama. Guna pelaksanaan rencana tahunan maka telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 beserta perubahannya, yang disusun berdasarkan RPJMD 2021-2026, sebagai dasar pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Anggaran yang tersedia untuk Belanja Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2023, untuk belanja sebesar Rp 2.538.758.283.000,00 didalamnya termasuk gaji pegawai.

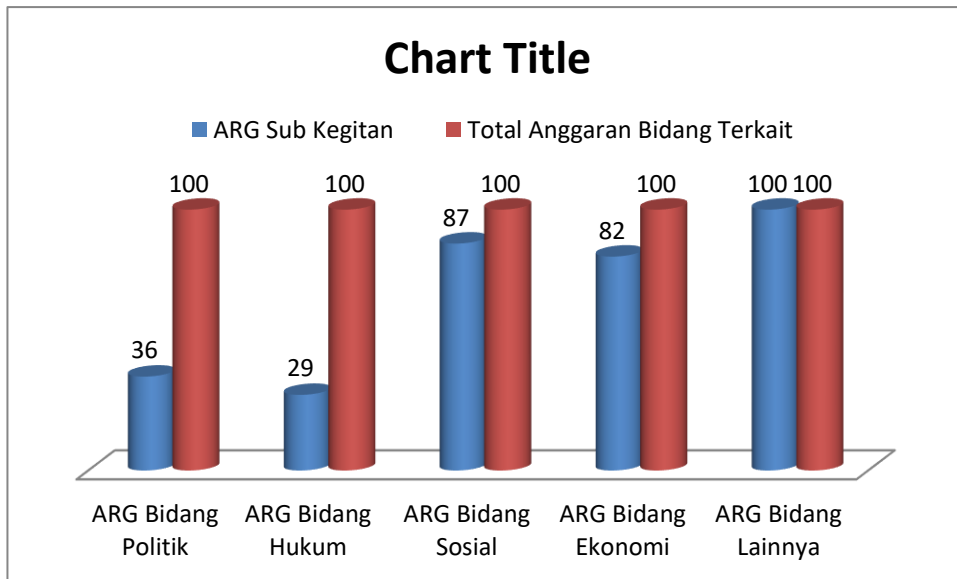
Grafik 11.2
Persentase ARG Kab Boyolali Tahun 2023



Berdasarkan grafik 11.2 memberikan gambaran bahwa OPD telah melaksanakan PPRG dengan memberikan / menyusun anggaran responsif gender secara optimal yaitu 49% atau (Rp. 1.212.950.208.540,.) dari Total Anggaran APBD di luar gaji Pegawai yaitu Rp. 2.384.325.445.392,.

Grafik 11.3

Persentase ARG Bidang pembangunan Kab Boyolali Tahun 2023



Berdasarkan grafik 11.3 menggambarkan komitmen penganggaran per bidang Pembangunan. Bidang politik meliputi Dinas Kesbangpol, Sekretariat DPR, Bidang hukum meliputi Dinas Satpol PP dan Bidang hukum Setda mempunyai anggaran ARG terendah 29%, Bidang sosial meliputi 10 OPD sehingga mempunyai anggaran ARG 87% kelompok bidang ekonomi mempunyai anggaran 82% sedangkan ARG kelompok lainnya termasuk kecamatan mempunyai anggaran semua atau 100%

LAMPIRAN INOVASI TAHUN 2023

NO	OPD	PERMASALAHAN	INOVASI
1	Dinas Kesehatan	Kematian Ibu dan Bayi	FORMAD KIBBLA
2	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Pelayanan Perpustakaan tingkatkan Minat Baca	Perpustakaan Onlin Remen Maos
3	TPKK KAB	Administrasi PKK	Administrasi PKK onlin
4	Dinas Pemuda dan Pariwisata	Pelayanan Publik	Kebogiro Sport Tourism
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bahan bacaan anak	Boyolali Kaya Cerita
6	Dinas Lingkungan Hidup	Pengolahan Sampah	Komposter Tumpuk
7	Dinas Lingkungan Hidup	Pengamanan Tanaman di Kebun Raya Indrokilo	Sistem informasi Registrasi Tanaman Indro kilo (SIGIT)
8	Puskesmas Gladaksari	Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif	Kebab Cinta (Kelas Ibu Balita Ceria Dan Tangguh)
9	Puskesmas Selo	Anemia pada remaja	Jumpa Besti (Jumat Pagi Bersama Tablet Besi)
10	DISKOMINFO	Mengatasi Kepadatan Lalulintas	Pantau Boyolali merupakan website yang dapat diakses secara online dan memungkinkan pengguna untuk melihat kondisi lalu lintas di berbagai titik jalan raya